

TEMPIAS

Dari Jikalahari untuk Hutan dan Rakyat

EDISI KHUSUS 15 TAHUN JIKALAHARI
26 FEBRUARI 2002 - 26 FEBRUARI 2017



**DARI KAMPUNG BERJUANG
MENYELAMATKAN HUTAN TANAH**

DAFTAR ISI



04

Masniar - Desa Pungkat (Inhil)
**Perempuan yang Merajut
Kembali Ketenangan di
Kampung Kelahirannya**



07

M. Ridwan - Desa Pulau Padang
(Kepulauan Meranti)
**Ridwan Dikriminalisasi
Membela Rakyat Pulau Padang**



10

Tarmizi - Desa Bantan Air
(Bengkalis)
**Tanggung Jawab Saya Kepada
Masyarakat**



13

Eddy Saritonga - Desa Segamai
(Pelalawan)
**Menyelamatkan Hutan Tersisa
di Desa Segamai**



16

Datuk Elvis - Desa Koto Lamo
(Kampar)
**Menjaga Hutan Dengan
Kearifan Lokal**



18

Firdaus - Desa Dosan (Siak)
**Masyarakat Dosan
Menyelamatkan Hutan Tersisa
di Siak**



20

Bende - Desa Anak Talang (Inhu)
**Pemuda 9 Penjaga Hutan Adat
Dubalang Anak Talang**

22

Cik Manan - Desa Sungai Tohor
(Kepulauan Meranti)
**Cik Manan, Sekat Kanal dan
Menanam Pohon Kelahirannya**



24

Andri Saputra - Desa Sungai Rawa
(Siak)
**Anak Muda Menjaga Alam,
Menjaga Kampung**



26

Kibo - Pekanbaru
**Merangkul Sababat Peduli
Lingkungan Melalui Seni**



28

Efendi - Desa Teluk Meranti
(Pelalawan)
**'Memulihkan' Kawasan Hutan
di Semenanjung Kampar**



30

HIPAM - Duri (Bengkalis)
**Hipam, Pegiat Alam Pelindung
Gajah**



33

Darwis - Dumai
**Darwis dalam Hutan Bakau
Dumai**



35

Tarmizi - Desa Jumrah (Rohil)
**Kebadiran Perusahaan, Derita
Bagi Tarmizi**



40

M. Hatta - Desa Situgal
(Kuansing)
**Labir di Hutan dan Berjuang
untuk Hutan**



GELIAT PEJUANG HUTAN DARI KAMPUNG



DIRGAHAYU JIKALAHARI KE-15.

Perjalanan Jikalahari sejak berdiri di tahun 2002 hingga menapak 15 tahun bukanlah jalan tanpa liku. Sebaliknya, rintangan dan hambatan selalu mewarnai gerak dan upaya menyelamatkan hutan Riau tersisa. Namun, keberhasilan dalam mengadvokasi isu kejahatan kehutanan korporasi, penyelamatan gambut, penegakan hukum, mendorong tata kelola hutan yang baik, tidak lepas dari sumbangsih dan kerja bersama anggota, jaringan baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, dan berbagai pihak yang memiliki perhatian dan tujuan yang sama dan sejalan. Sayangnya, pencapaian untuk pengelolaan hutan dan lahan yang berkeadilan dan berpihak pada rakyat masih harus diuji.

15 tahun Jikalahari berdiri, belum lengkap rasanya jika cerita perjuangan menyelamatkan hutan tidak menyertakan pengalaman-pengalaman para penyelamat hutan dan pembela hak rakyat yang berjuang di kampung-kampung. Mereka berhadapan dengan ancaman pengrusakan hutan, resiko, dan bahaya yang tidak kecil. Sebagai penghargaan kepada penyelamat hutan, buku ini terbit untuk menghadirkan sosok-sosok dan organisasi berani tersebut. Dengan beragam latar belakang dan profesi, ke-15 orang/organisasi ini berakhir pada pilihan menyelamatkan hutan, ruang hidup, dan lingkungan.

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya kami sampaikan kepada tim Penulis yang telah menyelesaikan karya berharga ini, juga kepada *The Siempuu Foundation* yang telah mendukung penerbitan buku ini secara khusus, dan telah mendukung kerja-kerja penyelamatan hutan secara umum. Akhir kata, semoga semangat berjuang dan menyelamatkan hutan dan tanah dari mereka terus menyala, karena apa yang telah dilakukan masih berupa rintisan tapak. Perjuangan belum selesai. Terus berjuang bagi HUTAN TANAH UNTUK RAKYAT!

Woro Supartinah
Koordinator Jikalahari

JIKALAHARI BERDIRI PADA 26 Februari 2002 di Pekanbaru, Riau. Jikalahari hadir karena Deforestasi telah mencapai pada titik sangat mengkhawatirkan. Bencana banjir, kebakaran hutan dan lahan yang melanda Riau, bukti bahwa hutan yang ada saat itu tidak lagi dapat menjaga keseimbangan lingkungan. Praktik-praktik pengelolaan hutan yang menjamin kelestarian hutan alam tidak lagi bisa dipercaya, bahkan praktik pengelolaan hutan yang berlangsung justru semakin mengancam keberadaan hutan dan masyarakat Riau. Slogan-slogan pengelolaan hutan untuk kesejahteraan masyarakat, hanya ilusi. Justru kantong-kantong kemiskinan berada di dalam dan di sekitar kawasan hutan.

JIKALAHARI berbentuk organisasi Jaringan yang Berbadan Hukum Perkumpulan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU- 0000049.AH.01.07.TAHUN 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau.

TEMPIAS
Dari Jikalahari untuk Hutan dan Rakyat

Jikalahari
Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau



Pemimpin Umum: Woro Supartinah (*Koordinator Jikalahari*)
Pemimpin Redaksi: Made Ali (*Wakil Koordinator Jikalahari*)
Editor: Okto Yugo Setiyo, Nurul Fitria, Gilda Pudika
Penulis: Made Ali, Okto Yugo Setiyo, Nurul Fitria, Suryadi
Layouter: Nurul Fitria

Perempuan yang Merajut Kembali Ketenangan di Kampung Kelahirannya

oleh: Okto Yugo Setiyo dan Nurul Fitria



KETEGANGAN Menguar di udara. Sekitar 200 pria berseragam lengkap—memakai helm, pentungan, perisai dan tertulis satuan Polisi Resor Indragiri Hilir (Polres Inhil)— melangkah masuk ke rumah-rumah dan mendobrak pintu. Laras panjang di tangan tak lepas dan tak segan untuk ditodongkan kearah siapa saja yang menghalangi jalan mereka. Satu persatu pintu dibuka—secara paksa—dan menyuruh penghuni di dalamnya keluar—ditarik paksa—menuju lapangan terbuka. Teriakan dan tangisan menghiasi hari mereka. Warga Desa Pungkat.

Satu persatu nama warga dicek. Jika nama yang dicari tak ditemukan, pasukan berseragam mendatangi kediaman nama yang tengah dicari. Ancaman dari pasukan berseragam ini terngiang-nyang di telinga warga. Jika orang-orang yang mereka cari tak segera menyerahkan diri, akan lebih banyak aparat yang mendatangi Pungkat. Para istri dari orang yang tak ditemukan hari itu menerima ancaman, jika suaminya tak menyerahkan diri, istrinyalah yang akan dibawa ke kantor polisi. Hari itu menjadi hari tak terlupakan bagi seluruh warga Pungkat, 6 Agustus 2014.

Begitulah gambaran suasana yang dikisahkan oleh seorang perempuan warga Desa Pungkat, Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir. Menggunakan kerudung, perempuan berusia 47 tahun ini berkisah tentang keributan yang terjadi di kampung halamannya.

MASNIAR seperti perempuan kampung kebanyakan. Ia seorang ibu rumah tangga yang punya usaha kecil—membuka warung menjual kebutuhan harian—di rumah dan juga bekerja sebagai petani. Pinang dan kelapa jadi komoditas utama warga Pungkat untuk dikelola dan diolah. Suaminya, Very Azhary bekerja menjual hasil bertani mereka serta membuka bengkel. Hasil penjualan ia simpan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta sekolah anaknya, Dalvi Aprianisma yang kini jadi mahasiswa di Universitas Islam Indragiri Hilir.

Kehidupan warga Pungkat mulai berubah pada 2013. Ketika mereka tahu ada aktifitas perusahaan sawit yang tergabung dalam First Resources Group, PT Setia Agrindo Lestari (SAL) di kampung halaman mereka.

PT SAL memperoleh izin lokasi dari Bupati In-

dragiri Hilir, Indra Mukhlis Adnan pada 2013 seluas 17.095 hektar. Persoalannya, perusahaan tidak pernah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Perihal penyusunan AMDAL yang seharusnya melibatkan masyarakat pun tak pernah dilakukan. Saat perusahaan mulai melakukan aktifitas, barulah masyarakat tahu. Setelahnya masyarakat serempak melakukan penolakan.

Penolakan dilakukan karena kebun kelapa, pinang serta hutan Desa Pungkat masuk dalam areal PT SAL. Padahal kebun serta hutan tersebut menjadi sumber penghidupan warga, terutama kayu di hutan diambil untuk dijadikan bahan pembuatan kapal. Ratusan warga Pungkat protes. Mereka meminta perusahaan menghentikan aktifitas dan menyelesaikan persoalan dengan warga terlebih dahulu. Namun tak ada tanggapan positif dari perusahaan.

Menurut Masniar, banyak persoalan yang muncul dengan adanya PT SAL di kampung halamannya. Selain menyebabkan hilangnya lahan perkebunan mereka, kehadiran perusahaan juga menyebabkan kualitas perkebunan kelapa menurun. Hal ini karena pembuatan kanal PT SAL yang tak dikelola dengan baik membuat air sungai yang menjadi sumber pengairan untuk kebun kelapa serta memenuhi kebutuhan sehari-hari warga—terutama untuk minum—menjadi kering. Warga terpaksa membeli air galon untuk minum setiap hari seharga Rp 20 ribu. “Perusahaan ini juga tumbang hutan-hutan alam tempat kumbang hidup, sekarang kumbang ini menyerang kebun kelapa kami,” keluh anak bungsu kedua dari 12 bersaudara ini. Akibat tindakan PT SAL, kumbang menjadi hama bagi warga yang bertani kelapa. Warga Pungkat semakin gencar menolak kehadiran perusahaan.

Warga tak putus asa. Mereka mengadu ke DPRD Inhil, Bupati, Komandan

Rayon Militer (Dandramil) bahkan ke Polres Inhil. Beberapa kali pertemuan diadakan untuk memperoleh penyelesaian dengan PT SAL. “Saya dan ibu-ibu lainnya juga ikut demo ke Bupati. Minta supaya perusahaan izinnya dicabut saja,” ujar anak dari pasangan Dahlan MS dan Esah ini. Hasilnya, DPRD, Bupati dan Babinsa Pungkat menandatangani kesepakatan dengan warga bahwa aktifitas perusahaan akan dihentikan sementara hingga konflik terselesaikan. Namun perusahaan melanggar kesepakatan tersebut dan tetap melakukan aktifitas.

Warga berang. Persoalan belum selesai. Kesepakatan untuk menghentikan sementara aktifitas tak dihiraukan PT SAL. Hasilnya pada 17 Juni 2014, duapuluh satu warga Pungkat—para pemuda serta lelaki dewasa Desa Pungkat—mengambil tindakan. Mereka membakar alat berat PT SAL di Parit 9 dan Parit 10 Pinang Seribu, Desa Belantaraya. Ada 9 eskavator, dua pondok dan satu unit mesin las yang mereka bakar. Tak ada korban jiwa. Namun dari sinilah teror bagi warga Pungkat dimulai.

Duapuluh satu warga Pungkat dicari oleh aparat. Sayangnya tindakan yang dilakukan aparat dalam menangkap warga dinilai tidak sesuai prosedur. Pasalnya tidak ada surat perintah penangkapan yang ditunjukkan serta tindakan yang dilakukan menimbulkan berbagai dampak negatif bagi warga. Terutama tekanan psikologis. Koalisi untuk Keadilan Ekologis—gabungan Masyarakat Peduli Inhil, WALHI Riau, Jikalahari dan Riau Corruption Trial—bahkan melaporkan tindakan aparat ini kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.



21 warga Pungkat yang ditangkap karena telah membakar alat berat milik PT SAL menunggu di dalam penjara sebelum sidang dimulai di PN Tembilahan.

Foto rct.or.id



Pertemuan Kelompok Perempuan Pungkat Bersatu yang rutin dilangsungkan tiap seminggu sekali membahas persoalan kesehatan, ekonomi kreatif dan hal lainnya yang dapat bermanfaat bagi perempuan Pungkat.

Dua dari 21 orang yang ditangkap merupakan keponakan Masniar, Handales dan Jumarli, anak dari kakak perempuannya, Asmidar. Keduanya satu warga Pungkat telah menjalani masa hukumannya. Pada 18 Desember 2014 Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Tembilahan memutuskan para terdakwa divonis penjara selama 6 bulan.

Masniar merasa prihatin dengan keadaan keponakan serta warga Pungkat lainnya yang harus menjalani hukuman demi membela hak mereka. Ia meneguhkan hatinya untuk berjuang membela hak-hak warganya. “Saya tak mau kalau sumber nafkah warga Pungkat ini dirampas,” katanya. Ia juga menekankan agar masyarakat jangan mau bekerja untuk perusahaan, “jangan sampai kita jadi kuli di kampung kelahiran kita sendiri.”

Masniar membuat gerakan untuk memberdayakan para perempuan Pungkat. Ia membuat Kelompok Perempuan Pungkat Bersatu. Tujuannya untuk mengatasi ketakutan pasca ‘kehadiran’

para aparat. “Banyak yang trauma karena kejadian itu, karena itu kelompok ini dibuat agar mereka ‘kembali beraktifitas seperti semula’ seperti sebelum kejadian,” ungkap Masniar.

Kegiatan kelompok ini beragam, mulai dari membuat kerajinan yang dapat dijual untuk membantu perekonomian keluarga serta penyuluhan-penyuluhan untuk meningkatkan rasa peduli terhadap kesehatan dan keluarga. Hingga saat ini, Kelompok Perempuan Pungkat Bersatu rutin melakukan pertemuan sekali seminggu dan berbagai kegiatan yang dinilai dapat memberikan manfaat pada masyarakat.

Masniar berharap agar izin PT SAL dapat segera dicabut. Sehingga masyarakat dapat hidup tenang tanpa dihantui rasa cemas. Tidak lagi ada konflik dan ancaman dari pihak perusahaan kepada warga, sehingga warga bisa menyekolahkan anak-anaknya dengan tenang. “Kami senang hidup di kampung ini. Walaupun tak kaya, kami sangat nyaman. PT SAL datang kesini justru membuat masyarakat dihantui trauma, ketakutan serta perpecahan.”#

SEKITAR pukul 10.00, orang-orang mengantre di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Jalan Pertanian Kabupaten Bengkalis. Satu persatu menunggu panggilan berdasarkan nomor antrean. Dengan tujuan, menemui keluarga dan sahabat dalam Lapas.

Bagi pengunjung, pemeriksaan dilakukan secara berlapis oleh petugas. Dari satu ruangan ke ruangan yang lain. Semua peralatan atau barang bawaan harus dititipkan ke dalam laci khusus yang diberi nomor. Setelahnya, baru diperbolehkan masuk ke satu tempat yang diperuntukkan menemui para narapidana.

Di ujung tembok lorong panjang, seorang laki-laki memakai kaos merah lengan panjang, jeans hitam, berdiri menyandarkan bahu dengan sebatang rokok di sela jari telunjuk dan tengah. Sekali hisapan dan menghembus asapnya, dia datang menghampiri. "Apa kabar geng?" spanya seraya menjabat tangan.

Ia Muhammad Ridwan. Aktivis Partai Rakyat Demokratik. Pernah jadi Ketua Serikat Tani

Riau. berasal dari Pulau Padang Kabupaten Kepulauan Meranti. Maret nanti, ia genap empat tahun menjalani hukuman, karena dianggap menghasut warga Pulau Padang dalam peristiwa pembakaran alat berat milik PT Riau Andalan Pulp and Paper, bahkan menghilangkan nyawa seorang operator alat tersebut.

"Ayo ke sana," ajaknya. Ridwan mengambil tikar yang sedikit lusuh lalu membentangnya. Kemudian mengajak duduk. Semua orang duduk di lantai lorong. Hanya beberapa yang beralaskan tikar.

Sangat ramai di lorong tempat bertemunya pengunjung dan para narapidana pagi jelang siang itu. Masing-masing asik bercengkrama. Ada yang makan bersama saling suap-suapan. Ada yang berpelukan sambil menangis. Di belakang kami, seorang pria memijat bahu dan lengan seorang perempuan yang menjenguknya. Sese kali ia memeluk dan mencium kepala perempuan itu dari belakang. Terlihat mesra sekali.

Ridwan Dikriminalisasi Membela Rakyat Pulau Padang

Oleh Suryadi

*Ridwan saat sedang berorasi menolak kehadiran PT RAPP di Pulau Padang.
Foto: gnp33jambi.blogspot.co.id*



Bagi narapidana yang tak dikunjungi, mereka sibuk dengan urusan masing-masing. Ada yang membersihkan sampah di lorong. Memotong rumput. Bahkan melamun sambil merokok.

Sangat mudah membedakan yang mana narapidana dan pengunjung Lapas. Semua narapidana pagi itu memakai kaos kuning tua. Berbeda dengan Ridwan. Selain memakai kaos merah lengan panjang, di dadanya ada tanda pengenalan sebagai Kolaborasi TBC dan HIV.

Ridwan jadi kader kesehatan dalam Lapas. Ia mendampingi petugas medis bila ada narapidana yang sakit. "Tadi saya barusan cek darah orang geng," tuturnya sambil tersenyum.

Badan Ridwan tampak berisi selama menjalani hukuman di Lapas. Kulitnya sedikit cerah. Yang tak berubah darinya, bibir hitam karena kebanyakan merokok. Saat mengobrol, dua bungkus Sampoerna di depannya.

Ia tampak ceria dan selalu tersenyum di tiap ujung pembicaraan, meski ada ucapan bernada keluhan yang keluar dari mulutnya. Selama dihukum, Ridwan lebih sering dikunjungi oleh

orangtua. Jarang sekali teman-teman seperjuangannya datang menjenguk. Ia merasa, perjuangan sekarang tak seperti dulu ketika dia masih bisa berkoar-koar di depan khalayak ramai.

"Saya dengar teman-teman sudah sibuk berbisnis dan terlibat politik. Ada juga saya dengar sibuk memikirkan takdir," ucap Ridwan sambil membuka sedikit bibirnya, lalu menghisap rokok. Sambung Ridwan, kalau sudah sibuk memikirkan takdir tak akan peduli lagi sama perjuangan. Meski begitu, Ridwan masih mengetahui perkembangan kampungnya. Informasi terakhir yang ia ketahui, lahan anggotanya di Pulau Padang masih aman. Alias tak diganggu oleh perusahaan. Tapi untuk lahan warga lain yang bukan anggota sudah diambil oleh perusahaan. Mereka kata Ridwan, menjualnya pada perusahaan. "Nanti mereka sendiri yang rugi."

Anggota yang dimaksud Ridwan, warga yang tergabung dalam Serikat Tani Riau.

Sebelum dihukum, Ridwan aktif menolak keberadaan PT Riau Andalan Pulp and Paper di Pulau Padang. Perusahaan di bawah naungan April Group ini menanam akasia di lahan gam-

Posko aksi bakar diri yang didirikan Ridwan beserta warga Pulau Padang di depan Gedung DPRD Provinsi Riau. Menuntut agar SK 327 Menhut tahun 2009 di revisi dan mengeluarkan PT RAPP dari Pulau Padang. Foto: <http://mayonalpuerta.blogspot.co.id>



but dan menyerobot lahan masyarakat. Hampir seluruh warga Pulau Padang menolak keberadaan perusahaan.

Mulai dari menggalang dukungan, mengumpulkan tanda tangan sampai aksi di depan kantor pemerintah kabupaten dan provinsi. Bersama beberapa warga Pulau Padang terutama yang laki-laki, Ridwan pernah menjahit mulutnya lebih dari satu minggu di depan kantor DPRD Provinsi Riau. Bahkan, aksi Ridwan bersama warga Pulau Padang sampai ke Jakarta.

Sayangnya, perjuangan Ridwan bersama warga sampai pada peristiwa kekerasan terhadap operator alat berat perusahaan dan membakar alat tersebut. “Itu di luar dari perencanaan. Masyarakat sudah marah betul dan tidak bisa terbendung lagi.”

Ridwan memanggil temannya minta dibelikan tiga aqua botol. Tak lama kemudian pesannya datang. Ia pun lanjut bercerita.

Selain membela hak petani di Pulau Padang, Ridwan juga terlibat dalam perkara mematikan aliran listrik pada sumur minyak PT EMP Malacca Strait. Ia dituduh menghasut warga sehingga aliran listrik mati selama hampir 30 jam.

PT EMP yang awalnya bernama PT Kondur Petroleum bergerak di bidang pengeksplorasian minyak dan gas di Pulau Padang. Perusahaan ini dinilai bertindak diskriminasi terhadap buruh lokal yang bekerja. Hal ini terlihat dari buruh yang sudah bekerja puluhan tahun masih berstatus sebagai karyawan kontrak. Sementara pekerja dari luar daerah mudah mendapat jabatan meski baru diterima bekerja. Dari sinilah, awal mulanya Ridwan ditangkap oleh Polisi hingga dihukum.

Untuk kasus pembakaran alat berat, Ridwan dihukum bersama temannya Yanas. Sementara dalam kasus pemutusan aliran listrik ia dihukum bersama Muis. Masing-masing kasus Ridwan dihukum 16 tahun dan 1,6 tahun penjara. “Itulah geng. Padahal saya cuma membela warga.”

Menurut Ridwan, penangkapan dirinya dikarenakan ada yang berkhianat dalam perjuangannya. Satu hari sebelum ditangkap, ia ditelepon oleh intel beberapa kali. Itu mengisyaratkan bahwa keberadaan Ridwan sudah diketahui. Bahkan, kata Ridwan, kemana ia akan pergi seolah-olah sudah diketahui oleh intel tersebut. Tak



Ridwan saat berada di Tebet, Jakarta bersiap hendak melakukan aksi bakar diri menuntut PT RAPP di keluarkan dari Pulau Padang. Foto: Anugerah Perkasa

hanya itu, setelah ditangkap banyak perkara yang mau dituntut terhadapnya.

“Banyak Jaksa datang menemui aku. Tak satu saja. Berulangkali dengan orang yang berbeda-beda,” ingat Ridwan. Tapi, kata Ridwan, dia pasrah dengan hukuman yang diterima demi warga supaya tak ada lagi korban yang jatuh-han.

Dipenjara, ridwan tinggal bersama 11 orang narapidana lainnya. Jumlah ini melebihi kapasitas. “Semua Lapas begitu. Over kapasitas semua.” Selama mengobrol, pandangan Ridwan tak luput dari pintu masuk penjara. Seorang petugas berjenggot bolak-balik meninjau dari depan pintu. “Dia ngok kita dari tadi. Mungkin karena awak tu bawa catatan.”

Tak lama kemudian lonceng pertanda jam besuk berakhir. Lebih kurang dua puluh menit kami mengobrol. Sebelum berpisah, Ridwan masih sempat memberitahu, bahwa ia jadi instruktur senam dalam lapas. Mereka senam dari Senin sampai Jumat.#



Tanggung Jawab Saya Kepada Masyarakat

Oleh Okto Yugo Setyo dan Suryadi

PADA 30 Mei-6 Juni 2016, Tarmizi bersama Woro Supartinah (Koordinator Jikalahari) berangkat dari Indonesia ke Skotlandia. Ini pengalaman pertama Tarmizi ke Eropa.

Tarmizi hendak menyuarkan tuntutan masyarakat Bengkulu yang menolak kehadiran PT Rimba Rokan Lestari (APRIL Grup) dalam pertemuan Juru Kampanye se-Eropa di Skotlandia. Jikalahari, salah satu anggota Komite Pengarah Jaringan Kertas Eropa (*European Environmental Paper Network*). EEPN berupaya menciptakan iklim produksi dan konsumsi kertas global yang bertanggungjawab dan memperhatikan aspek sosial dan lingkungan.

Mereka membahas situasi di wilayah kerja masing-masing. Tarmizi berbicara di depan seluruh

peserta selama 45 menit. Ia menceritakan kondisi geografis Kabupaten Bengkulu terutama Kecamatan Bengkulu dan Bantan. Juga historis Bengkulu, kekayaan alam, sumberdaya manusia, potensi alam serta keanekaragaman masyarakat. Cerita Tarmizi sampai masuknya PT Rimba Rokan Lestari di Kabupaten Bengkulu.

Tarmizi masih ingat, dia dan beberapa NGO lainnya meminta perwakilan NGO lingkungan dari China, supaya mendesak pemerintahnya agar menghentikan pengucuran dana dari Asian Development Bank untuk APRIL Grup, induk perusahaan PT Rimba Rokan Lestari. Kemudian, perwakilan dari Jerman dan Amerika juga diminta untuk mengkampanyekan penghentian pemakaian kertas dari APRIL Grup. "Karena setahu saya dua negara itu banyak menerima pasokan kertas dari APRIL Grup."

Tarmizi juga bilang dalam pertemuan itu, izin PT Rimba Rokan Lestari harus dicabut. “Saya bilang ke mereka, saya tak mau negosiasi-negosiasi. Intinya perusahaan harus henggang.”

Sekira lima ribu warga dari 19 Desa di Kecamatan Bantan dan Kecamatan Bengkalis menolak kehadiran PT RRL karena ruang hidup masyarakat berupa pemukiman, rumah, perkebunan kelapa, karet, pinang, sagu dan sawit yang menjadi mata pencaharian mereka masuk dalam konsesi PT RRL. Temuan Jikalauhari, ruang hidup masyarakat sudah ada sebelum Indonesia merdeka atau jauh sebelum PT RRL beroperasi pada 1998.

Reaksi warga Kecamatan Bantan dan Bengkalis menolak keberadaan PT Rimba Rokan Lestari sudah terlihat dari tiap desa di dua kecamatan tersebut. Mereka mulai bergejolak dengan membicarakan persoalan ini dari mulut ke mulut. Ucapan bernada ancaman terhadap perusahaan bahkan sudah mulai terdengar di tengah-tengah masyarakat.

Bahkan ada ungkapan, kalau tanah kita diambil kita ganti dengan nyawa. Kalau hak kita dirampas kita rampas pula hak mereka.

Tarmizi tak ingin kemarahan warga berujung pada kekerasan. Ia kemudian mengumpulkan pentolan atau pimpinan kelompok dari masing-masing desa. “Mereka itu sudah buat kelompok-kelompok. Kalau mereka terkotak-kotak seperti itu, sangat mudah dipecah atau diadu domba.”

Tarmizi buat pertemuan pertama di Gedung Wanita Desa Bantan Air Kecamatan Bantan. Seingatnya, sekitar 800 warga hadir saat itu. Dalam pertemuan ini, Tarmizi menginginkan, agar warga dari masing-masing desa berhimpun dalam satu wadah perjuangan. Pasalnya, tujuan dari tiap kelompok ini sama. Yakni,

Tarmizi mempresentasikan persoalan yang terjadi di desanya serta dampak akibat beroperasinya PT Rimba Rokan Lestari di Kecamatan Bantan dan Kecamatan Bengkalis. Foto: Jikalauhari.

ingin PT Rimba Rokan Lestari henggang dari wilayah mereka atau izinnya dicabut oleh pemerintah.

Warga tak menolak dengan ajakan Tarmizi. Saat itu juga warga sepakat menunjuknya sebagai Ketua Kelompok. Namun, Tarmizi tak serta merta menerima usulan warga. Ia sempat bingung dan berpikir lama sebelum mengambil keputusan. “Saya minta mereka untuk berembuk lagi dan memikirkan matang-matang kalau saya sebagai ketua.”

Sampai pada pertemuan ketiga, Tarmizi akhirnya luluh dan menerima kepercayaan dari warga. Dari sini mereka membentuk kelompok yang diberi nama Aliansi Masyarakat Bengkalis dan Bantan Tolak PT Rimba Rokan Lestari. Masing-masing kecamatan dan desa ditunjuk seorang Koordinator. Tarmizi sendiri dibantu Eko Pambudi sebagai Sekretaris.

Program kerja mulai dibentuk. Berbagai rencana aksi mulai digelar.

Meski sudah membentuk satu organisasi bersama, warga di Kecamatan Bantan dan Bengkalis tak serta merta nyamar selama PT Rimba Rokan Lestari berada di wilayah mereka. Sejak mengetahui keberadaan perusahaan ini, aktifitas warga mengelola lahan mulai berkurang. Mereka takut satu saat setelah lahan mereka diolah dan produktif diklaim oleh perusahaan berada di wilayah konsesinya.

“Gara-gara itu pendapatan masyarakat sekarang mulai berkurang. Membersihkan kebun saja mereka malas. Mereka merasa takut dan waswas,” ujar Tarmizi. Kata Tarmizi, sekarang lahan



masyarakat banyak yang terbingkai.

Kata Tarmizi, setelah dia pulang, alat berat perusahaan tak ada lagi di lokasi. Dia memang belum mengecek langsung. Informasi tersebut diterimanya dari warga.

“Kehadiran PT RRL mempengaruhi psikologi masyarakat, kami menjadi tidak tenang saat berkebun, karena kebunlah satu-satunya sumber penghidupan kami,” kata Tarmizi, 45 tahun warga Desa Bantan Timur yang lahir dan besar di desanya.

Tarmizi lahir di Desa Bantan Air, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, 20 Juni 1971. Ayahnya lahir di Desa Pematang Duku, ibunya lahir di Desa Bantan Air.

Ia pernah menjabat Kepala Desa Bantan Air dua periode, dari tahun 2002. Kini Desa Bantan Air mekar jadi empat desa: Bantan Air, Teluk Papal, Bantan Sari dan Bantan Timur. Kini, ia tinggal di Desa Bantan Timur.

Tarmizi bersama seluruh warga Bantan Air hidup dengan hasil pertanian dan hasil menangkap ikan di laut. Suami dari Radiah ini hidup seperti masyarakat pada umumnya yang juga mengandalkan hasil pertanian dan perkebunan. Ia menanam kelapa, karet dan sawit.

Di Kecamatan Bantan, masyarakat yang hidup di sana terdiri dari bermacam suku, mulai dari suku Melayu, suku asli, Minang, Batak dan suku Jawa yang telah menetap sejak lama.

Semuanya hidup rukun dan normal, meski memiliki latar belakang suku yang berbeda. Dalam acara-acara adat, masyarakat melaksanakan dengan cara adat Melayu, misalnya saat pernikahan, maka prosesinya menggunakan adat Melayu seperti saat prosesi pernikahan adanya hantaran dari mempelai laki-laki.

PT RRL mengklaim telah mengantongi izin dari Menteri Kehutanan sejak 1998. Sontak masyarakat menjadi panik dengan adanya berita tersebut, karena perkebunan, jalan, bahkan sebagian pemukiman masuk dalam klaim PT RRL. Selain itu yang membuat masyarakat heran, izin yang diberikan sejak 1998, tapi baru diketahui pada 2015.

Tarmizi merasa memiliki tanggung jawab untuk

membebaskan masyarakat dan hutan tanah yang tersisa dari rampasan PT RRL karena pernah menjabat sebagai kepala Desa Bantan Air selama dua periode. Selain itu ia memandang bahwa hutan yang tersisa merupakan cadangan air bagi masyarakat Bengkalis dan Bantan, terlebih lokasi tersebut merupakan areal gambut yang memiliki kedalaman lebih dari 5 meter. “Selain itu yang paling utama adalah bahwa pulau Bengkalis adalah tanah kelahiran saya.”

Sejak awal terbentuk aliansi masyarakat menolak PT RRL, Tarmizi dan masyarakat terus melakukan perjuangan. Awalnya berkumpul sekira 800 orang dari 8 desa dan saat ini sudah berkembang hingga 19 desa dari Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan.

Gerakan sosial terus mereka perjuangkan. Pada September 2016, Pansus DPRD satu diantaranya merekomendasikan kepada Bupati Bengkalis mengeluarkan kebijakan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar mencabut atau sekurang-kurangnya meninjau ulang SK Menhut No 262/KPTS-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian HPH HTI seluas 14.875 ha kepada PT Rimba Rokan Lestari (RRL).

“Kami apresiasi hasil pansus DPRD yang bekerja sesuai dengan tuntutan masyarakat Bantan dan Bengkalis. Kami juga mendesak kepada DPRD Bengkalis agar memerintahkan Bupati Bengkalis segera menjalankan rekomendasi pansus,” kata Tarmizi, Koordinator Aliansi Masyarakat Bantan dan Bengkalis. “Karena empat bulan berjalan, hingga detik ini Bupati Bengkalis belum merespon hasil Pansus DPRD.”

Harapan Tarmizi dan masyarakat Bengkalis adalah izin PT RRL yang sudah menyalahi prosedur dan merampas tanah masyarakat agar segera dicabut. PT RRL beroperasi berdasarkan SK Menhut No 262/KPTS-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian HPH HTI seluas 14.875 ha kepada PT Rimba Rokan Lestari (RRL).

Tarmizi dan ribuan warga Bengkalis masih menunggu respon Bupati Bengkalis, sembari menyiapkan gerakan sosial, Tarmizi mendesak Presiden dan KLHK segera mencabut izin PT RRL dari Bengkalis.#

SAMPAN KAYU bermuatan empat orang mengarungi Sungai Kampar. Dua orang memegang kayu untuk mendayung sampan agar bergerak. Satu di belakang dan lainnya di depan. Siang itu mereka hendak menuju Hutan Desa Segamai. Memantau kondisi hutan yang mereka peroleh hak kelolanya setelah berjuang sejak 2009, bersaing dengan perusahaan besar yang juga ingin mengelola hutan untuk kegiatan restorasi ekosistem.

Salah satu penumpang di sampan itu adalah Eddy Saritonga. Ia Ketua Lembaga Pengelola Hutan Desa (HD) Segamai Kecamatan Teluk Meranti, Pelalawan dan berjuang sejak awal agar HD dapat terealisasi dan segera disahkan Menteri Kehutanan. “Inilah lagi hutan tersisa yang harus dijaga untuk anak cucu nanti,” kata pria kelahiran Pulau Muda, 1 Juli 1977 ini.

Perjuangan Eddy bersama masyarakat untuk memperoleh hak kelola Hutan Desa ini tak mudah. Sejak 2009, bersama Yayasan Mitra Insani, Jikalahari dan Badan Teritorial Telapak Riau,

masyarakat Desa Segamai mengajukan usulan ke Bupati Pelalawan agar areal bekas HPH PT Agam Sempurna seluas 7.576 hektar dapat dikelola menjadi Hutan Desa. Usulan saat itu tak ditanggapi, Eddy tak patah semangat. Saat Bupati Pelalawan diganti HM Harris, mereka kembali ajukan usulan.

Pada 8 Maret 2013, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengabulkan usulan warga dengan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No 154 dan 155/Menhut-II/2013 tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Desa Segamai dan Serapung seluas 4.000 hektar. Masing-masing desa diberi hak kelola hutan seluas 2000 hektar. “Ini perjuangan kita, karena kita yang pertama berhasil memperjuangkan untuk kelola hutan ini, dan semoga bisa dicontoh daerah lain” kata guru di SDN 006 Segamai ini.

RASA PRIHATIN melihat kondisi hutan di kampung halamannya yang terus dirusak membuat Eddy berpikir harus melakukan sesuatu.

MENYELAMATKAN HUTAN TERSISA DI DESA SEGAMAI

Oleh Nurul Fitria



“Kita ini hidup dari hutan, tapi kalau hutan sudah rusak dan tak ada lagi, mau hidup macam mana?” pertanyaan ini yang berkecamuk dalam pikirannya.

Eddy menceritakan kehidupan masyarakat Desa Segamai sangat bergantung dari kayu hutan. Mereka membutuhkan kayu untuk membuat rumah ataupun sampan. Dahulu, masyarakat menyambung hidup dengan bertani jagung dan kelapa. Saat ini sudah berkembang menjadi petani sawit, “Dulu juga kita lakukan illegal logging,” ujar bungsu dari 8 bersaudara ini.

Saat masih bersekolah, untuk mendapat uang jajan, ia bersama beberapa warga ikut menebang kayu hutan alam dan mengumpulkannya ke penjual. Hasil dari penjualan ini ia simpan. Namun melihat hutan terus ditebang, Eddy berpikir ini bukanlah cara yang benar. Ia mulai mengubah cara pikir instan untuk mendapatkan uang dengan menebang hutan. “Saat ini memang banyak uang kita pegang, tapi mau sampai kapan uang itu ada?” ujarnya.

Putra dari pasangan Usup dan Simar ini mengatakan susah mengajak masyarakat sadar tentang pentingnya menjaga hutan. Para tetua berpikiran bahwa dengan menjual lahan ke perusahaan, mereka dapat memperoleh penghasilan setiap bulan. Namun Eddy menentang pemikiran ini. Menurutnya saat ini hutan alam sudah ditebang dan diganti akasia oleh perusahaan di sekitar Desa Segamai seperti PT Satria Perkasa Agung dan PT Mitra Hutani Jaya. Akibatnya, kayu-kayu alam sudah tak banyak lagi, serta ini mengganggu habitat satwa di sekitar desa. “Di sini masih ada harimau juga, kalau tak ada hutan macam mana dia hidup?”

Ia juga berusaha menyadarkan warga, jika hutan sudah tak ada lagi, bagaimana dengan anak cucu kelak yang tak lagi bisa melihat lestari alam dan hijaunya pepohonan dengan ukuran yang besar sebagai tempat bernaung. “Inilah usaha kecil kita yang berhasil kita wujudkan untuk menyelamatkan hutan tersisa.”

Saat ini Eddy berusaha agar luasan dari hutan desa ini dapat terus bertambah. Pada saat perpanjangan PAK Hutan Desa Segamai Maret 2015, luasan HD bertambah menjadi 2270 hektar. “SK ini berlaku sampai Agustus 2017, kita berharap ini segera diperpanjang supaya kita dapat terus mengelola hutan ini.”





Eddy bersama rekan-rekannya sedang mendatangi Hutan Desa Segamai. Mereka melakukan pengecekan terhadap tanaman dan satwa yang ada di hutan tersebut. Eddy dan rekan-rekannya juga membuat akses jalan untuk memudahkan menelusuri hutan desa tersebut.

Perjuangan menyelamatkan hutan tersisa di Segamai tidaklah selalu mulus. Eddy menceritakan saat baru memperoleh izin mengelola hutan desa, ia kesulitan masuk ke kawasan hutan tersebut. Lokasi HD Segamai berada 15 kilometer jauhnya dari desa. Mereka harus gunakan sampan mengarungi Sungai Kampar untuk sampai ke lokasi karena berada di muara sungai. Selain itu mereka juga harus melewati konsesi HTI milik PT Satria Perkasa Agung. “Waktu itu kita cuma minta izin lewat, memberitahu saja karena

kita sudah punya izin,” cerita Eddy. Tantangan lainnya yang harus dihadapi adalah luasan hutan alam yang terus tergerus oleh perluasan konsesi HTI.

Saat ini Eddy bersama masyarakat sedang mendorong agar luasan HD bertambah dengan mendorong pemerintah mengurangi luasan kawasan Restorasi Ekosistem milik PT Gemilang Cipta Nusantara (GCN), anak perusahaan PT Riau Andalan pulp and Paper. Perusahaan HTI ini memperoleh rekomendasi IUPHHK-RE dari Bupati Pelalawan HM Harris pada 2011. Padahal saat itu, selain Desa Segamai dan Serapung, ada dua desa lainnya yang juga ajukan Hutan Desa, yaitu Desa Teluk Meranti dan Pulau Muda.

“Sekarang ini masih bermasalah kita dengan perusahaan, kalau lihat di peta hutan desa kita itu tumpang tindih dengan areal perusahaan ini,” cerita Eddy. Pada Desember lalu pihak perusahaan membuat kesepakatan dengan masyarakat untuk penyelesaian konflik ini. Masyarakat ingin agar lahan seluas 455 hektar yang tumpang tindih tersebut diserahkan seutuhnya ke hutan desa. Saat ini Eddy masih belum mau menandatangani nota kesepakatan tersebut karena menurutnya saat itu perusahaan terlalu banyak memberikan syarat-syarat. “Biarlah masyarakat yang kelola, makin banyak hutan desa, terlindungi hutan-hutan di Riau ini.”

Ia mengeluhkan jika hutan diserahkan ke perusahaan, dimana lagi anak cucu mereka kelak dapat hidup. Menurut Eddy, dengan adanya hutan desa, maka ini tak hanya menjadi bagian dari penyelamatan lingkungan, namun juga bisa menjadi sumber mata pencarian masyarakat. “Kalau kita menarik orang-orang datang ke Teluk Meranti karena ada Wisata Bono, kita buat di sini wisata hutan desa. Lihat pohon-pohon besar dan tanaman-tanaman hutan lain yang sudah langka itu,” kata Eddy.

Eddy berharap usaha untuk mengembangkan hutan desa ini dapat disetujui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar dapat menyebar ke desa-desa lainnya. Karena dengan usaha kecil ini, hutan-hutan di Riau dapat diselamatkan. “Cobalah rasakan bedanya udara di desa dengan udara di hutan ini,” kata Eddy. Jangan berpikir untuk menumbangkan kayu hanya untuk kesenangan sesaat.#



Menjaga Hutan dengan Kearifan Lokal

Oleh: Okto Yugo Setiyo

ELVIS lahir 26 Juni 1977 di Desa Koto Lamo Kecamatan Gema, Kabupaten Kampar, begitu juga kedua orang tua, kakek nenek dan kakek buyut serta nenek moyangnya juga lahir dan hidup di Koto Lamo.

Elvis memiliki seorang istri dan dua orang anak. Saat ini kedua anaknya sedang menuntut ilmu, di salah satu pesantren pekanbaru dan di sekolah dasar di kampung halaman.

Elvis dipilih menjadi pemimpin ninik mamak yang menjaga adat istiadat atau “dituakan satu hari, didulukan satu langkah” di kenagarian Koto Lamo. Datuk Elvis bergelar Datuk Bandaro berasal dari suku Pitopang.

Sebagai pimpinan adat, Datuk Elvis memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga adat, masyarakat dan hutan tanahnya. Saat ini dirinya telah berhasil membukukan semua adat, petatah petitih yang diturunkan dari nenek moyangnya. Tujuannya ialah untuk menjaga adat tetap lestari dan mengambil keputusan adat secara benar.

Hutan tanah juga menjadi bagian yang terpisahkan bagi adat kenagarian Koto Lamo, masyarakat tanpa hutan ibarat semut tanpa sarang, ibarat raga tanpa nyawa. “Selain menjaga adat istiadat, menjaga hutan tanah juga merupakan tantangan yang berat bagi saya, karena banyaknya rayuan dari pihak luar,” kata Datuk Elvis.

Pada 2015, ada pihak luar yang mencoba mengambil lahan hutan tanah dengan cara akan membeli dari masyarakat. Modusnya, pemodal tersebut merintis hutan beberapa hektar, lalu memberi tanda cat merah dan mengatakan ke masyarakat, siapa yang memiliki lahan di dalam dan sekitar lokasi tersebut akan dibeli lahannya. “Keinginan masyarakat untuk menjual hutan tersebut meningkat dan menimbulkan persoalan sosial.”

Masyarakat yang ingin menjual hutan tanahnya mencapai 117 orang, dan mendesak ninik mamak untuk menandatangani surat tanah sebagai syarat untuk pengakuan kepemilikan tanah. “Hal tersebut menjadi tantangan berat bagi ninik mamak, karena menghadapi kemenangan sendiri untuk menyelamatkan hutan,” kata Elvis.

“Sebagai upaya menyelesaikan persoalan tersebut, maka kami undang semua masyarakat yang

akan menjual dan ninik mamak di kenagarian Koto Lamo untuk bermusyawarah di rumah ini.” Namun, musyawarah tidak memunculkan solusi dan masyarakat bersikeras bagaimanapun caranya akan menjual hutan tersebut. Datuk Elvis beranggapan jika musyawarah ataupun perundingan tetap dilakukan di Koto Lamo malah akan menimbulkan situasi yang tidak kondusif.

Untuk menindaklanjuti, Datuk Elvis bersama ninik mamak menelusuri tentang si pembeli. Dari hasil penelusuran, “kami berjumpa dengan perpanjangan tangan si pembeli dan saat itu bermacam rayuan dan kalimat sogokan tapi kami tidak gentar dan menolak untuk menjual hutan tanah tersebut kepada pembeli tersebut,” kata Elvis.

Penolakan menjual hutan tanah membuat persoalan semakin besar, apalagi jika masyarakat yang 117 orang itu tahu bahwa ninik mamak yang melarang pembeli untuk membeli hutan tanah tersebut. Tapi Datuk Elvis tetap mencari solusi untuk menyelamatkan hutan dan masyarakat menerima hutan tanah tetap tidak dijual.

Dalam upaya mencari strategi yang terbaik, Datuk teringat dengan seorang anggota DPRD Kab. Kampar bernama Ramadhan yang pernah membantu persoalan tanah.

Hasil pertemuan dengan Anggota DPRD menghasilkan suatu terobosan, karena Ramadhan tahu situasi Koto Lamo. DPRD tidak mau melakukan dengar pendapat tapi langsung menghubungi Camat untuk tidak mengeluarkan surat apapun terkait hutan tanah di Desa Koto Lamo.

“Serangkaian perjuangan tersebut menghasilkan perkembangan yang positif, situasi dimasyarakat semakin sejuk dan pembeli juga tidak tahu ke mana dia untuk berusaha membeli.”

Menyelamatkan hutan dengan tidak menjualnya tidak lantas membuat Datuk Elvis hanya diam saja dan tidak peduli terhadap ekonomi masyarakat. Seiring dengan bantuan dan dampingan Rumah Budaya Sikukeluang dari Pekanbaru, Datuk Elvis bersama masyarakat mengembangkan ekowisata dengan menjual keindahan alam Desa Koto Lamo.

Berbagai kegiatan wisata alam dipersiapkan bersama antara masyarakat dan Rumah Budaya Sikukeluang. Mulai dari fasilitas perahu hingga



fasilitas *camping ground*.

Selain mengembangkan Ekowisata, Datuk Elvis juga bersama Yayasan Hakiki mengajak masyarakat membudidayakan madu Kelulut, masyarakat setempat menyebutnya madu Galo-galo. Madu Kelulut sendiri memiliki nilai jual yang fantastis mencapai 3 kali lipat dari madu hutan. Saat ini ada sekitar 50-an sarang budidaya Kelulut yang dimiliki Datuk Elvis dan masyarakat dan sudah menampakkan perkembangannya. Sesuai jadwal, budidaya Kelulut akan panen pada April 2017.

“Hutan Koto Lamo juga memiliki potensi kelulut yang besar. Hutan Koto lamo juga memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat secara ekonomis, seperti Petai, Kembang semangkok dan lain-lain.”

“Dengan kehidupan kami sekarang, tidak bisa dibayangkan kalau hutan ini tidak ada lagi, karena hutan itu marwah kami dan masyarakat dan hutan ibarat badan dengan nyawa. Kami juga bergantung kepada air sungai untuk semua kebutuhan hidup masyarakat. “Kalau hutan rusak, hilang maka air akan keruh, dan semakin kecil,” kata Elvis, prihatin.

“Harapan kami masyarakat Koto Lamo, bahwa ada kegelisahan kami adalah penetapan kawasan hutan di atas hutan tanah ulayat kami menjadi kawasan hutan, hutan lindung dan lainnya sewaktu-waktu akan memberikan izin ke pihak luar, dan kami harus terusir dari tanah kelahiran kami,” katanya.

“Kami berharap hutan ulayat kami menjadi hutan adat. Tujuan kami mendapatkan pengakuan hutan adat bukan untuk semena-mena terhadap hutan. Semua bisa lihat, sejak nenek moyang kami hidup di sini tidak ada kami merusak hutan. Bahkan kami siap untuk menjaga dan melestarikan hutan lestari,” kata Elvis.



Masyarakat Dosan Menyelamatkan Hutan Tersisa di Siak

Oleh Made Ali

DI TENGAH pemandangan nan menyejukkan Danau Nagasaki, Firdaus menceritakan kehidupan masa kecilnya berenang di Danau seluas sekira 400 ha itu. Ia berenang dan menikmati pemandangan sekitar Danau yang masih dikelilingi hutan alam.

Gambaran Danau Nagasaki dan hutan alam tersisa yang mengelilinginya saat ini, kenangan Firdaus tiga puluh tahun lalu. Firdaus lahir di desa Dosan, 10 Agustus 1978. Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA). Di desa Dosan bertani karet, dan nelayan, mata pencaharian utama masyarakat Dosan.

Desa Dosan sebelum tahun 1999 masuk dalam Kabupaten Bengkalis. “Desa Dosan dulu tertinggal,” kata Firdaus, mata pencaharian utama warga tidak mampu keluar dari jerat kemiskinan, meski di kelilingi hutan alam. Saat, Siak lepas dari Bengkalis dan menjadi Kabupaten Siak, Dosan mulai berkembang, selain dekat mengurus urusan Desa di Ibu Kota Kabupaten.

Ekonomi mulai meningkat di Desa Dosan, saat Bupati Arwin AS meluncurkan program SIAK 1 2003 Program Ketahanan Pangan. Pemda Siak membangun kebun sawit seluas 3.500 hektar untuk 7 desa di Kecamatan Pusako dan Sungai Apit.

Lahan Desa telantar yang sudah menjadi belukar bekas ladang warga yang berpindah-pindah seluas 724 hektar dijadikan perkebunan kelapa sawit yang diolah bersama

290 Kepala Keluarga (KK). Masing-masing KK ada yang mengolah satu hingga dua hektar.

Lalu, kebun sawit diserahkan pada Koperasi Bunga Tanjung dalam keadaan sawitnya kurang terawat. Tiga perusahaan terlibat dalam permodalan dan skill. PT Persi pemodal mewakili Pemda Siak, PTPN V sebagai tenaga teknis dan PT Siak Prima Nusantara sebagai konsultan. Dalam perjalanan, PT Siak Prima Nusantara hanya mengambil fee, padahal masyarakat berharap diberi pemahaman mengurus sawit.

Panen pertama tahun 2008 kebun mulai menghasilkan ratusan ribu untuk KK. “Meski masih sedikit keuntungannya, masyarakat mulai merasakan dampaknya,” kata Firdaus. Dua tahun kemudian, jutaan rupiah mereka hasilkan dari tiap panen kebun. Dan terus meningkat tahun ke tahun.

Namun, mereka merasakan dampak lainnya, udara makin hari panas di Desa Dosan. “Padahal waktu kecil, udara tidak sepanas sekarang. Sebab hutan masih banyak di Dosan,” kata Firdaus. Firdaus menjadi Kepala Desa Dosan sejak 2007 hingga kini.

Warga Desa Dosan berembuk membicarakan perubahan suhu di kampung mereka. Hasil rembukan, mereka bersepakat tidak lagi melakukan ekspansi sawit, cukup yang sudah ada sekarang.

Lalu, Firdaus dan Dahlan warga Dosan berkenalan dengan Yayasan Elang. Pada 2009 Elang memperkenalkan metode produksi sawit lestari dalam bentuk Best Management Practice. Elang salah satu anggota Jikalahari. Elang bersama Jikalahari setahun kemudian dibantu TFCA mulai memperkenalkan pada masyarakat Dosan.

Kini Dosan sedang mengurus sertifikat RSPO sawit berkelanjutan. Artinya, sawit yang ramah terhadap lingkungan hidup.

Masyarakat Dosan mulai menyadari pentingnya menyelamatkan hutan alam tersisa. Hutan di Dosan tersisa seluas 400 ha termasuk Danau Nagasaki, mereka selamatkan dengan cara membuat Peraturan Desa.

Firdaus mulai berbicara dan mewakili Desa Dosan dari Riau di forum nasional terkait ini-

siatif sawit berkelanjutan dan menyelamatkan hutan di Desa.

Pada 2013, Firdaus bersama Elang, Jikalahari dan Greenpeace Firdaus dan Pemda Siak berhasil mendatangkan Menteri Pertanian Anton Apriantono ke Dosan untuk melihat langsung sawit yang dikelola Desa. “Menteri mengapresiasi kami dan memberi bantuan untuk meningkatkan pertanian di Dosan,” kata Firdaus.

Kini Danau Nagasaki dikenal hingga ke manca negara,” orang-orang bule datang melihat langsung. Mereka senang. Orang-orang itu dibawa oleh Elang, Jikalahari dan Greenpeace,” kata Firdaus. “Bupati Siak sudah berkunjung juga ke Danau Nagasaki.”

Meski Firdaus sebagai Penghulu berhasil menyelamatkan hutan alam tersisa dan danau Nagasaki serta sawit lestari di Kampung Dosan, kekhawatirannya kembali muncul. “Desa Dosan masuk dalam konsesi HTI PT Arara Abadi,” katanya. “Danau Nagasaki dan sawit Lestari juga masuk dalam konsesi PT Arara Abadi.”

Hingga saat ini tapal batas antara Desa Dosan dan PT Arara Abadi belum selesai. “Kami minta dienclave, Desa Dosan dikeluarkan dari konsesi PT Arara Abadi. Sebab jauh sebelum PT Arara Abadi ada di Siak, masyarakat Dosan sudah ada,” kata Firdaus. “Danau Nagasaki tempat kakek saya cari ikan.”

Danau Nagasaki sedang bersolek, sore itu 21 Februari 2017. “Ini mau dijadikan lokasi pembukaan MTQ oleh Bupati Siak,” kata Firdaus. Kantin terbuat dari kayu sudah berdiri. Di depan kantin ada pendopo untuk duduk santai. Di tengah danau ada dua pondokan terapung. Sejak dua minggu ini, dua model mainan model Bebek yang bisa dinaiki dua orang meramaikan Danau.

Di pintu masuk Danau juga sudah dibangun portal dan parkir kendaraan. Bagi pengunjung tidak dikenakan biaya. Hanya parkir dikenakan biaya. Biaya itu untuk penjaga Danau Nagasaki yang juga warga Dosan. “Danau Nagasaki sudah masuk dalam destinasi wisata Siak oleh Dinas pariwisata,” kata Firdaus.

Firdaus berharap pada pemerintah pusat,” keluarkan Desa Dosan dari konsesi PT Arara Abadi.”.#

PEMUDA 9 PENJAGA HUTAN ADAT DUBALANG ANAK TALANG

OLEH NURUL FITRIA

MENTARI pagi iringi langkah sembilan pasang kaki memasuki kawasan hutan. Saat itu tepat pukul delapan. Ransel berisi bekal makanan menggantung di tiap punggung kesembilan pemuda yang terus beranjak masuk ke kawasan Hutan Adat Dubalang Anak Talang. Dua hari penuh mereka akan kelilingi hutan, melindungi hutan mereka dari kegiatan illegal logging.

Sejak 2014 silam, sembilan pemuda ini mulai lakukan patroli di Hutan Adat Dubalang Anak Talang di Desa Anak Talang, Indragiri Hulu. Salah satu penggeraknya, Supriadi. Sejak menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Batang Cenaku, Bende—sapan akrab Supriadi—bersama 8 temannya punya inisiatif buat patroli keliling hutan adat mereka.

Bende dan kawan-kawan menyebut diri sebagai Pemuda 9 Penjaga Hutan, ini didasarkan cerita dari tetua Suku Dubalang Anak Talang bahwa dulu juga ada Pemuda 9 yang ditokohkan di suku tersebut. Selain Bende, kedelapan pemuda lainnya adalah Darsen, Aan Pardinata, Seki, Joni, Bujang Hadi, Alri, Dedi Asmar dan Edi.

“Waktu itu kita lihat hutan kita sudah banyak dirusak, ini akan berdampak ke masyarakat kita juga,” kata pemuda kelahiran Anak Talang, 20 Maret 1995 ini. Sebagai putra adat, Bende dan kawan-kawan bertekad harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan hutan mereka. Berbekal semangat, mereka mulai lakukan patroli mengelilingi hutan seluas 23 ribu hektar.

Saat berpatroli, mereka tidak menggunakan



Bende bersama Pemuda Sembilan Penjaga Hutan dan warga Desa Anak Talang menyita alat berat PT Runggu. Mereka menuntut agar PT Runggu diusir karena beraktifitas tanpa izin.

kendaraan. Hanya berjalan kaki menyusuri pepohonan dan meningkatkan indra penglihatan mereka untuk memastikan tidak ada kegiatan illegal logging yang dilakukan di kawasan hutan adat tersebut. “Kita biasanya mulai jalan pukul 8 pagi sampai 4 sore. Setelah itu istirahat dan dilanjutkan keesokan hari,” ujar anak bungsu dari 3 bersaudara ini.

PATROLI PEMUDA 9 PENJAGA HUTAN terus berlangsung sejak 2014 hingga kini. Biasanya dalam sebulan, mereka akan lakukan patroli 2 kali. Pada 2015, Bende dan kawan-kawan pernah menemukan kegiatan *illegal logging* yang dilakukan oleh oknum TNI dalam kawasan hutan Adat Dubalang. “Kita datang dan tanya, waktu itu kita sempat dibentak juga, tapi kita jelaskan lagi ini hutan alam dan tidak boleh diambil kayunya,” cerita putra dari pasangan Aminudin dan Warni ini.

Bende mengaku sempat merasa takut juga, namun ia meyakini bahwa yang dilakukannya benar dan berusaha menjelaskan kepada oknum



TNI tersebut. “Karena dia aparat jadi mengerti juga soal hukum, kita juga bilang kalau tidak dihentikan akan dilapor ke polisi,” tambah Bende. Setelah kejadian tersebut, oknum TNI tidak pernah kembali lagi mengambil kayu.

Patroli lainnya yang dilakukan Pemuda 9 juga berhasil menangkap kegiatan illog yang terjadi di Sungai Petimah. Bende dan kawan-kawan menyerahkan hasil tangkapan tersebut ke Polsek Kecamatan.

Saat ini Pemuda 9 sedang melakukan perlawanan terhadap PT Runggu Prima Jaya yang beroperasi di Desa Anak Talang. Masyarakat menolak kehadiran perusahaan ini karena melakukan penebangan kayu di kawasan Hutan Adat dan tidak memiliki izin. Pada 20 Februari 2016, masyarakat menahan 2 alat berat PT Runggu Prima Jaya sehingga terkendala untuk beroperasi.

Pada 8 Maret 2016, Bende bersama Batin Adat

Talang Mamak, Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Indragiri Hulu didampingi Penghimpun Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN) melakukan mediasi di Kantor Camat Batang Cenaku. Tujuannya mencari penyelesaian aktifitas PT Runggu di Indragiri Hulu yang beraktifitas tanpa ada izin.

Masyarakat menuntut agar PT Runggu diusir dari kawasan tersebut dan harus mengganti kayu hutan yang telah ditebang. “Namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari permintaan kita,” ujar kader Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ini.

Dalam melakukan penyelamatan lingkungan, Bende dan kawan-kawan harus melewati berbagai tantangan. Ia terkadang diejek oleh pemuda lainnya karena melakukan kegiatan yang tak bermanfaat. Selain itu, saat melakukan aksi menolak PT Runggu, ia juga kerap mendapatkan ancaman. “Pernah aku dan kawan-kawan diancam untuk dibunuh karena sudah mengganggu perusahaan,” cerita Bende.

Setelah mendapatkan ancaman tersebut, ia dan kawan-kawan lari meninggalkan desa dan merasa ketakutan. Hingga 2 minggu mereka tak kembali, Datuk dari Suku Talang Mamak mendatangi Pemuda 9 dan memberikan nasehat. Para tetua dan masyarakat adat menaruh harapan besar untuk melindungi desa mereka. “Waktu itu dibiling, kalau bukan kita siapa lagi. Itu yang membuat kami berani untuk terus berjuang,” cerita Bende. Setelah itu mereka kembali ke desa dan kembali memperjuangkan haknya.

Tantangan lainnya yang dihadapi Pemuda 9, terkadang saat melakukan patroli, medan yang berat serta jumlah yang terbatas juga menjadi permasalahan. Saat ini Pemuda 9 sedang merekrut anak-anak muda lainnya agar mereka sadar tentang pentingnya menjaga hutan saat ini.

“Harapan kita, para pemuda dan masyarakat sadar betapa pentingnya lingkungan bagi kehidupan kita. Maka kita harus terus menjaganya,” kata Bende. Ia berharap pemerintah baik dari desa hingga pemerintah pusat harus terjun langsung melihat kondisi hutan di lapangan. Tindak tegas para perusak dan orang-orang yang tidak bertanggungjawab tersebut agar jera dan tidak lagi merusak lingkungan. Karena hutan bukan hanya untuk dilihat oleh generasi saat ini, tapi juga generasi yang akan datang.#

Cik Manan, Sekat Kanal dan Menanam Pohon

oleh Suryadi

OKTOBER dua tahun lalu, Abdul Manan diajak ke Jakarta. Bersamanya ikut beberapa aktivis lingkungan dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Riau, Haris Gunawan akademisi Universitas Riau yang kini jadi anggota Badan Restorasi Gambut, Greenpeace dan Yayasan Perspektif Baru.

Di sana, mereka bertemu di satu tempat dengan pegiat lingkungan hidup dari Walhi Nasional. Abdul Manan cerita kondisi kampung halamannya yang kerap mengalami kebakaran hutan dan lahan bila musim kemarau tiba. Untuk mengantisipasi kebakaran supaya tidak terjadi berulang-ulang, Abdul Manan sebutkan, masyarakat di sana buat tebat. Tebat ini bahasa lain dari blocking kanal.

Tebat dibuat untuk menjaga ketinggian air dalam kanal agar tanah gambut tetap basah. Cara ini dianggap ampuh untuk menyiasati kekeringan di lahan gambut akibat pembuatan kanal, terutama kanal yang dibuat oleh perusahaan hutan tanaman industri yang ada di Kepulauan Meranti.

Dari pertemuan ini, Abdul Manan buat satu petisi yang ditujukan pada Joko Widodo. Isinya, menyerukan pada Presiden Republik Indonesia tersebut agar datang ke Riau, meninjau wilayah yang kerap mengalami kebakaran hutan dan lahan serta dilanda asap. Petisi yang dinamakan blusukan asap ke Riau ini didukung 28.177 orang.

Abdul Manan curhat dalam petisinya. Bencana asap di Kabupaten Kepulauan Meranti sudah menjadi hal biasa bagi masyarakat selama 17 tahun. Selama itu pula masyarakat menghirup asap berbulan-bulan lamanya ditiap tahun.

Secara medis, kebiasaan menghirup asap akibat kebakaran di lahan gambut dapat mengganggu pernapasan bahkan berujung pada kematian. Bayi-bayi yang lahir terindikasi mengalami



(Atas): Cik Manan salah seorang yang peduli dengan lingkungan. Ia menjaga kearifan lokal dengan mempertahankan tanaman sagu. Orang yang datang diwajibkan menanam pohon. Foto: selatpanjangpos.com. (Kanan): Setelah mengirim petisi kepada Presiden Joko Widodo, saat blusukan ke Sungai Tohor, Jokowi memberikan bantuan kepada masyarakat Sungai Tohor. Foto: Riausky.com dan Rakyatmediapers.co.id

kelemahan mental dan berpikir akibat polusi yang dihirup sang ibu selama mengandung dimusim asap.

Belum lagi kerugian ekonomi yang dialami masyarakat bila lahan mereka terbakar. Pada tahun 2014, saat Abdul Manan buat petisi ini, 24 ribu lahan gambut di Sungai Tohor habis terbakar.

Hampir satu bulan kemudian, 27 November 2014, petisi Abdul Manan disambut oleh Jokowi dengan blusukan langsung ke Sungai Tohor. Presiden ke 7 RI itu datang bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Arsyadjuliandi Rahman Gubernur Riau serta beberapa staf lainnya.

Memakai kemeja putih, Jokowi beserta rombongan naik becak motor dan berjalan kaki sesaat menuju lokasi sekat kanal buatan warga. Abdul Manan dengan senang menghampiri langsung Jokowi dan terus berdampingan sembari berbincang-bincang, menjelaskan hasil kerjanya dengan warga membendung air dalam kanal.



Bahkan, Jokowi secara simbolis ikut turun menancapkan papan kayu dari pohon sagu ke dalam kanal untuk menahan aliran air. Jokowi juga menyerahkan bantuan Rp 300 juta pada warga untuk terus membuat sekat kanal. Abdul Manan menerima langsung bantuan tersebut di hadapan warga Sungai Tohor.

Tak habis di sini, Jokowi juga diajak menanam pohon sagu di lahan warga dan berdialog di lapangan bola di tengah terik matahari. Jokowi berpesan pada warga untuk terus menjaga lingkungan. Melestarikan kearifan lokal dengan mempertahankan tanaman sagu sebagai penghasilan utama dan terbesar warga Sungai Tohor.

ABDUL MANAN biasa disapa Cik Manan. Pria kelahiran Sungai Tohor Kecamatan Tebing Tinggi Timur 1973 ini, mulai prihatin dengan kondisi hutan di desanya setelah mengundurkan diri bekerja dari PT Riau Sakti United Plantation. Ia bekerja 15 tahun di perusahaan yang mengo-

lah kelapa dan nenas ini. Keputusan itu diambil pada 2008.

Cik Manan mengembangkan usaha sagu ketika kembali ke kampung halaman. Di sinilah, Cik Manan bersama warga lainnya mulai berhadapan dengan perusahaan yang selama ini dianggap merusak lingkungan dan menghambat budidaya tanaman sagu mereka. Kebakaran hutan dan lahan terus terjadi tiap tahunnya. Lahan mereka gampang kering. “Padahal untuk menanam sagu itu butuh air,” ujar Cik Manan.

Cik Manan memimpin warga Sungai Tohor menolak keberadaan PT Lestari Unggul Makmur (LUM). Mereka demonstrasi di Pemerintahan Kabupaten Meranti. Mengumpulkan tanda tangan warga sebagai bentuk penolakan. Bahkan menolak segala bentuk bantuan dari perusahaan. Kata Cik Manan, dia dan warga belajar dari pengalaman daerah lain yang sudah merasakan dampak keberadaan perusahaan.

Baginya, menjaga hutan yang tersisa di Kepulauan Meranti adalah tradisi yang sudah turun temurun dari nenek moyang terdahulu. Mereka diajarkan menebang hutan dan diganti dengan tanaman sagu karena tanaman ini tidak menyebabkan kekeringan. Hutan yang ditebang juga tidak sembarangan. Pohon-pohon besar dijaga dan tidak dirusak sama sekali. Pohon ini selain sebagai penyangga hutan, juga sebagai batas lahan masing-masing warga.

“Dulu zaman orang tua kami dulu tak pernah ada yang namanya hutan terbakar. Sekarang, semenjak perusahaan masuk kebakaran terus terjadi tiap tahun. Tambah lagi perusahaan di sini menanam akasia. Habislah pulau ini kalau dibiarkan,” kata Cik Manan.

Sekarang, Cik Manan dan warga terus memperluas program sekat kanal di Sungai Tohor. Dengan swadaya masyarakat, sekat kanal diharapkan mampu mencegah kekeringan dan kebakaran hutan. Mereka tak pernah berharap dan menunggu bantuan dari pemerintah. Cik Manan juga buat kebijakan pada tamu yang datang ke Sungai Tohor. Mereka diwajibkan menanam pohon sepanjang tepian kanal yang ada.

“Yang sudah melakukan itu ada yang dari universitas Jepang,” jelas Cik Manan. Bibit pohon ini pun disediakan oleh warga setempat tanpa bantuan pemerintah.#



Anak Muda Menjaga Alam, Menjaga Kampung

Oleh Nurul Fitria

SAYA DULU PELAKU *ILEGAL LOGGING*,” aku pria yang duduk di sebuah kedai kopi di kota Siak Sri Indrapura itu sambil menghisap rokoknya. Usai menghembuskan asap rokok dari mulutnya, ia mulai berkisah.

Andri Saputra Yahya nama pria itu. Berasal dari Desa Sungai Rawa, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, ia menceritakan pengalamannya menghadapi persoalan lingkungan yang terjadi di tanah kelahirannya.

Sungai Rawa merupakan desa yang berada di pesisir berbatasan langsung dengan Selat Panjang. Sebagaimana kawasan pesisir, Sungai Rawa kaya akan tanaman mangrove yang menjadi pelindung agar tak terjadi abrasi akibat terpaan air laut dari Selat Panjang tersebut. Tak hanya mangrove, desa juga memiliki kawasan hutan yang rimbun dan menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat.

Namun perusakan hutan mulai terjadi sejak ia kecil. Aan—sapaan akrab Andri, singkatan dari anak-anak nakal—ingat saat libur sekolah di SMAN 1 Sungai Apit, ia kerap ikut dengan orang-orang kampung untuk menebang kayu. “Itu zaman Megawati presidennya, menumbang kayu masih banyak dilakukan warga,” cerita pria kelahiran 10 November 1987 ini.

Beranjak dewasa dan meneruskan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, Aan memilih masuk Akademi Kesenian Melayu Riau. Belajar musik Melayu ini tak lama ditekuninya. Enam bulan setelah belajar, ia memutuskan kembali ke kampung. Walaupun sempat dimarahi kedua-orangtuanya, Aan tetap memilih berkegiatan di kampung.

“Waktu itu saya merasakan perubahan iklim di Sungai Rawa,” kata alumnus MTS Nurul Ikhsan Sungai Rawa ini. Ia merasa sejak kecil iklim di kampungnya ini tidak terlalu panas, namun kini ia merasakan cuaca sangat panas dan berakibat terhadap kulit masyarakat. “Berkebum saja dulu kita masih baik-baik saja, kulit tak palah hitam. Sekarang ini orang-orang kulitnya sudah hitam je,” kata Aan. Ia berpendapat ini karena hutan sudah banyak hilang akibat adanya kegiatan illegal logging.

Merasa prihatin dengan keadaan kampungnya, Aan mendirikan pramuka. Kegiatan yang

dilakukan saat itu adalah gerakan menanam pohon. Melihat keadaan kampungnya yang belum banyak berubah, Aan mulai berpikir tindakan lain yang harus dilakukannya. “Saya mulai berpikir saat dinasehati orang tua ketika merintis tanah,” kata anak kedua dari 4 bersaudara pasangan Yahya dan Khairani ini.

Aan menceritakan orangtuanya berpesan ia harus melanjutkan kuliah dan membuat perubahan di kampungnya ini. orangtuanya berpesan agar saat kuliah ia berorganisasi dan belajar banyak hal. Mengamini pesan orangtuanya, Aan melanjutkan kuliah pada 2007 di Universitas Islam Riau mengambil Jurusan Hukum. Ia juga bergabung di Himpunan Mahasiswa Islam dan bersama-sama membuat gerakan menghimpun mahasiswa bergabung dalam Gerakan Mahasiswa Peduli Kabupaten Siak (GMPKS) pada 2010. Periode awal ia menjadi Wakil dan pada 2012 – 2014 ia jadi Ketua dari GMPKS.

Saat berkegiatan di GMPKS, Aan beserta kawan-kawannya mulai berkenalan dengan organisasi non pemerintahan yang fokus menyelamatkan lingkungan, salah satunya Jikalahari. Di GMPKS, Aan pernah melakukan gugatan kepada Badan Operasi Bersama (BOB) PT Petro Selat terkait upah tenaga kerja di perusahaan minyak bumi tersebut. Advokasi yang dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat yang memperoleh upah Rp 800 ribu per bulannya. Saat membantu masyarakat, Aan dan kawan-kawan tidak mengharapkan uang. “Kita cuma bilang, jadikanlah anak-anak bapak ibu seperti kami ini, jadi bisa banyak yang berjuang.”

Saat itu Aan sadar, banyak hal yang harus dilakukan untuk membantu masyarakat dan menyelamatkan lingkungan di kampung halamannya itu.

PADA 2013, Aan kembali menemukan persoalan di Sungai Rawa. Saat itu sedang terjadi konflik tapal batas antara masyarakat dengan PT Arara Abadi, perusahaan HTI yang terafiliasi dengan APP. Masyarakat ingin mengetahui batas lahan perusahaan sehingga masyarakat tidak perlu takut beraktifitas mengelola kebun. “Masyarakat tentu sangat semangat, sejak 2013 sampai sekarang masih belum jelas juga mana batasnya,” kesal Aan.

Selain membantu penyelesaian persoalan tapal batas, Aan bersama masyarakat juga melakukan protes kegiatan bloking kanal yang dilakukan PT Arara Abadi di Sungai Rawa. Perjuangannya melawan perusahaan juga dilakukan terhadap limbah perusahaan yang mengotori Tasik Atas dan Tasik bawah di Danau Zamrud. “Kalau tak kita yang menjaga kampung ini, siapa lagi yang diharap.”

Ancaman terbesar bagi tempat kelahiran Aan yang berada di pesisir ini adalah abrasi serta hancurnya tanaman mangrove. “Kalau ada ponton—kapal pengangkut kayu akasia—yang lewat dan jatuh, mangrove itu hancurlah dihantamnya.” Aan beserta kawan-kawannya pernah menyanai ponton itu milik perusahaan mana saja, tujuannya untuk meminta ganti rugi. Kayu yang jatuh dari ponton dan dibawa ombak banyak merusak tanaman mangrove. Tuntutan warga, perusahaan harus mengganti bibit-bibit mangrove yang telah dirusak.

Mangrove yang merupakan tanaman mayoritas di Sungai Rawa saat ini sedang dikembangkan oleh Aan bersama masyarakat untuk dijadikan objek wisata.

Pada 5 Februari 2017 silam, Bupati Siak, Syamsuar meresmikan areal ekowisata Mangrove di Sungai Rawa. “Ini dikembangkan untuk kebaikan masyarakat juga, nanti bisa meningkatkan ekonomi serta kesadaran masyarakat soal menjaga lingkungan.”

Bagi Aan, saat ini penting untuk menumbuhkan potensi bagi generasi muda untuk sadar dengan persoalan yang ada di sekelilingnya. “Yang penting itu, bagaimana kita membunuh rasa takut masyarakat untuk menyuarakan ketidakadilan,” ujarnya. Ketidakadilan melawan perusahaan, ketidakadilan kebijakan-kebijakan yang tidak memperhatikan keadaan masyarakat. Menurutnya, ini adalah persoalan terbesar yang dihadapi masyarakat.

“Pemuda itu harus menjaga alam dengan baik. Dengan begitu, mereka juga menjaga kampungnya sendiri,” Aan sampaikan kata-kata yang ia jadikan motivasi saat bertemu pemuda-pemuda kampung. Menurutnya, ketika menjaga alam saja tidak bisa, bagaimana mereka akan berjuang untuk menjaga kampungnya sendiri.#

INI UNTUK M

RASA GUGUP menghampiri pria dengan rambut kribo ini. Duduk memegang gitar dan memperbaiki posisi microphone ia lakukan untuk menenangkan pikirannya. Saat ia menerima tanda dari panitia untuk mulai menyanyi, lantunan lagupun terdengar. Lagu ini berjudul Raung dan Umba. "Raung berarti Harimau dan Umba berarti Lumba-lumba," ujar pria bernama Habibi ini.

Saat itu pada 29 Juni 2014 ia mendapat kesempatan tampil menjadi pengisi acara Debat Calon Presiden Republik Indonesia putaran kelima. Bersama Greenpeace, ia menampilkan lagu-lagu bertema penyelamatan lingkungan. "Waktu itu dikasi tempat di lantai 1 Hotel Bidakara, Jakarta Selatan tempat pelaksanaan debat Pilpres," tambah pria yang akrab disapa Kibo ini. Menurutnya lagu yang ia tulis tersebut mewakili Presiden sebagai harimau dan Wakil Presiden sebagai lumba-lumba. "Ini menunjukkan pemimpin kita akan menjaga daratan dan lautan agar terus lestari dan terjaga."

Saat tampil di depan para tamu undangan hadir di acara debat, Kibo merasa tidak percaya ia memperoleh kesempatan langka ini. "Aku merasa seperti mimpi, ada Menteri yang hadir dan banyak yang suka dengan lagu ini. Ini kenangan paling berharga dan karyaku ini adalah karya paling berkesan. Ditampilkan ditingkat nasional."

KIBO sudah tertarik dengan dunia seni, terutama musik sejak SMA, namun ia baru menghasilkan lagu berkaitan dengan lingkungan saat kuliah di Universitas Islam Riau. Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini sering berkumpul dengan Mahasiswa Pecinta Alam. "Dari kumpul-kumpul dan ikut camping, aku jadi terinspirasi untuk buat lagu," cerita pria kelahiran 2 Agustus 1990 ini.

Menurut Kibo, ketika berada di alam, inspirasi untuk membuat lagu datang begitu saja. Namun ia mulai merasa sedih ketika melihat dari tahun ke tahun, keadaan alam mulai dirusak. Penebangan kayu alam serta kebakaran hutan dan lahan dari tahun ke tahun membuat keadaan Riau menjadi semakin parah. "Aku mulai berpikir un-

tuk mengajak kawan-kawan peduli dengan lingkungan melalui lagu," ujar anak bungsu dari 4 bersaudara ini.

Pada 2014, Kibo bersama Badan Eksekutif Mahasiswa UIR melakukan aksi terkait asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Riau. Pada 2015 lalu, ia juga turut menyanyikan lagu bertema ajakan menyelamatkan lingkungan di Festival Sagu Sungai Tohor. "Walaupun dari syair sederhana, harapannya itu bisa mengetuk pintu hati generasi muda untuk peduli dengan lingkungan," tambah pria yang hobi bermain bola ini.

Saat tampil di Sungai Tohor, ia berkesempatan tampil bersama Ikhsan Skuters idolanya. Kibo kagum dengan Ikhsan karena

**Merangku
Peduli Lin
Melalu**

Oleh Nuru



NEGERIKU !!!

Kibo.

Kibo dan teman-temannya di komunitas Seni Jalanan berencana untuk mengadakan festival musik yang dapat menggugah kesadaran generasi muda untuk lebih peduli lingkungan. Salah satunya ketika kegiatan hari sampah, ia berencana akan undang seluruh musisi yang punya kepedulian untuk menyelamatkan lingkungan tampil di festival tersebut. Harapannya dengan musik, pesan tersebut dapat diterima dengan mudah dan lebih menyentuh.

berani mengkritik pemerintah serta persoalan yang terjadi disekitarnya melalui lagu. Kibo berharap ia juga dapat menghasilkan karya seperti Ikhسان dan mengajak banyak orang untuk ikut peduli melestarikan lingkungan. “Aku nggak mau dibilang jadi aktivis momen, yang muncul cuma saat momen-momen tertentu seperti asap.”

Tak hanya lewat seni musik, Kibo juga turut bergabung dan membentuk Pondok Belantara Adventure Riau. Ia bersama rekannya Eko Handyko mendirikan pondok yang dijadikan tempat berkumpul bagi teman-teman pemusik serta mahasiswa yang peduli dengan lingkungan. “Kegiatan kita saat ini mengumpulkan buku-buku bekas yang dapat dimanfaatkan teman-teman yang datang ke pondok. Banyak juga buku-buku tentang lingkungan yang kita kumpulkan,” kata

Perjuangan Kibo untuk mewujudkan cita-citanya ini tak jarang dicemooh oleh rekan-rekannya sendiri. “Pernah ada yang bilang, untuk apalah bicara soal lingkungan, macam iya saja,” tutur pria yang juga aktif di Komunitas Happy Reggae ini. Saat mendengar cemoohan itu, Kibo merasa semakin semangat untuk membuktikan bahwa caranya ini bisa jadi salah satu alternatif menyadarkan orang-orang tentang pentingnya menyelamatkan lingkungan.

Menurut alumni SMAN 5 Dumai ini, pemerintah harus berkomitmen untuk penyelamatan lingkungan. Sudah banyak kasus-kasus lingkungan berkaitan dengan korupsi serta kebakaran yang belum selesai. “Pemerintah jangan main kucing-kucingan kalau membahas penyelamatan kelestarian hutan ini,” tambahnya.

Mulai dari diri sendiri, berikan senyum untuk hutanmu,
Mari bersama meraih impian, mari bersama meraih mimpi,
Dengan penuh warna warni ceria menggapai hari yang cemerlang

Genggam tanganku kepal jariku
Katakan kita bersahabat
Berjanji bersama menggapai cita cita
Menyelamatkan ciptaannya

Bersahabat dengan pohon dirimba
Bersahabat dengan ikan di laut
Bersahabat dengan burung di langit
Bersahabat dengan gunung yang tinggi
Bersahabat dengan alam yang indah
Kita semua bersahabat sesama ciptaan Tuhan.#

Sahabat
Lingkungan
Seni
Fitria



'Memulihkan' Kawasan Hutan di Semenanjung Kampar

Oleh: Nurul Fitria

UNTUK membuat keranda orang mati saja sekarang susah," keluh Efendi, Warga Teluk Meranti, Pelalawan.

Ia berkeluh kesah tentang persoalan yang terjadi di desa kelahirannya saat ini. Ketika kayu hutan sudah tidak bisa diambil lagi, masyarakat Teluk Meranti kesulitan memenuhi kebutuhan berbahan dasar kayu. Diantaranya membuat rumah, perahu atau sampan serta jembatan. Dengan adanya larangan untuk mengambil kayu, kini masyarakat kebingungan untuk mencari pengantinya.

Efendi ceritakan karena Teluk Meranti berada dalam kawasan gambut dalam, ketika ada orang yang meninggal dan hendak dikuburkan, butuh kayu untuk kerandanya. "Sekarang sudah susah, rumah-rumah lapuk, sampan dah payah dibuat, untuk orang mati pun susah," ujar pria kelahiran 10 April 1974 ini.

Tak hanya persoalan kesulitan mencari kayu, kekeringan di lahan gambut juga sedang terjadi di Teluk Meranti. Dengan adanya perusahaan HTI besar seperti PT RAPP dan PT Arara Abadi, ditambah manajemen air yang tak baik membuat gambut kering dan berdampak pada masyarakat. "Dulu setengah meter saja kita sudah bisa dapat air, sekarang gali 3 meter pun belum tentu dapat," ujar pria yang akrab disapa Fendi ini.

Abrasi Bono serta angin kencang yang menerjang rumah di Teluk Meranti juga jadi masalah. Menurut Fendi, jika dulu abrasi akibat bono hanya 50 meter, kini bisa mencapai 200 meter. Sedangkan angin kencang terjadi jika angin dari laut berhembus. "Ini semua karena sudah tak ada pohon dari hutan yang menahan air dan angin itu," keluh anak ke-7 dari sepuluh bersaudara ini karena perusahaan juga mengambil kayu-kayu yang berada di bagian pinggir sungai.

FENDI bersama masyarakat yang berada di Semenanjung Kampar membentuk Forum Masyarakat Penyelamat Semenanjung Kampar pada 2009. Ia ditunjuk sebagai ketua. Forum ini dibentuk untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat di Semenanjung Kampar.

Dengan adanya forum tersebut, Fendi beserta pengurus berusaha memperjuangkan hak-hak masyarakat. Salah satunya pada 2012 ia bersama Jasri, Nando, H Rusma, Abdul Malik dan Mu-

hammad Nasir menggugat Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan dan Bupati Pelalawan H M Harris. Gugatan Masyarakat (Citizen Law Suit) yang intinya merevisi SK Menhut 327 tahun 2009 dan menjadikan hutan Negara tidak lagi kawasan HTI PT RAPP melainkan konsesi seluas 43.400 hektar di Semenanjung Kampar dijadikan Hutan Desa, Hutan Tanaman Rakyat atau Hutan Kemasyarakatan, dengan catatan tanah milik warga terlebih dahulu dikeluarkan (enclave).

WARGA kelurahan Teluk Meranti sejak ribuan tahun lalu, sebelum Indonesia merdeka, hidup makmur. Pasalnya, tersedianya sumber-sumber kehidupan; hasil pertanian melimpah, perikanan, hutan kayu juga melimpah.

Namun, sejak masuknya PT Riau Pulp and Paper (RAPP), dengan mengantongi SK Menhut 327 tahun 2009 keadaan berbalik. Hasil kehidupan mereka dari alam sirna. Walaupun masih bisa berladang, namun penghasilan sedikit, karena banyaknya hama babi hutan. PT RAPP dapat konsesi lewat SK Menhut 327 tahun 2009 secara keseluruhan seluas 151.254 hektar di Kabupaten Pelalawan.

Saat ini Fendi dan FMPSK sedang mengembangkan usaha budidaya jambu madu yang memanfaatkan lahan gambut sebagai medianya. Menurut suami dari Roziana ini, budidaya jambu ini dijadikan alternatif bagi masyarakat yang saat ini sudah sulit untuk bertani karet dan jagung, karena adanya larangan membakar lahan. "Kita tak mau lagi ada masyarakat kena kriminalisasi karena bersihkan lahan bekas jagung dengan bakar. Makanya kita cari apa yang bisa kita kembangkan di desa ini," ujar ayah dari Randi Setiawan, Indah Febrianti dan Gita Arianti ini.

Harapannya dengan berkembangnya budidaya jambu madu dengan memanfaatkan medium tanah gambut ini, masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. "Ini semua kita pelajari dari internet, kita coba-coba. Kalau berhasil, ini bisa jadi contoh dikembangkan di daerah lain," tambah Fendi.

Untuk mengatasi persoalan abrasi dan angin kencang, saat ini Fendi dan FMPSK sudah melakukan penanaman tanaman hutan seluas 2 hektar di desa Teluk Meranti awal 2016.



"Memang masih kecil cuma 2 hektar, tapi ini akan kita kembangkan lagi, supaya tanaman hutan tumbuh lagi," kata Koordinator Kelurahan Teluk Meranti Jaringan Masyarakat Gambut Riau ini.

Ia dan pengurus FMPSK saat ini sedang berusaha mewujudkan terbentuknya Ekowisata Hutan Gambut dan Wisata Bono di Teluk Meranti. Dengan terealisasinya rencana ini, diharapkan perhatian untuk menjaga kelestarian hutan gambut terus tumbuh di masyarakat serta dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Berbagai usaha yang dilakukan Fendi dan FMPSK saat ini adalah usaha kecil yang diharapkan dapat menarik perhatian pemerintah agar lebih memperhatikan desa mereka.

Fendi mengeluhkan kehadiran perusahaan HTI besar di Teluk Meranti yang berada dalam kawasan gambut dalam. Berbagai persoalan mereka hadapi karena kehadiran perusahaan. "Kalau kemarau kita sulit air, kalau penghujan, siapa-plah banjir semua," kata Fendi. Penyebabnya kanal-kanal yang dibuat perusahaan ditembuskan langsung ke laut dan tidak adanya pengelolaan air yang baik. Selain itu masyarakat juga menemukan adanya kebun sawit dalam kawasan HTI yang seharusnya dijadikan kawasan konservasi.

"Ini sudah kita adukan ke Pemerintah Desa, Polisi, Bupati. Tapi tak ada kejelasan tindak lanjutnya. Tak adalah pemerintah ni liat betul langsung di lapangan apa yang terjadi dengan masyarakat," keluh Fendi. Ia berharap pemerintah jangan hanya membuat kebijakan di pusat, tapi tak mengimplementasikannya hingga ke daerah. "Kami dengar kebijakan tu bagus, tapi sampai pun tidak dibuat ke desa kami ini."#

PADA 5 Juli 2015, saya bersama Zulhusni Syukri dan Arif dari Hipam bergerak memasuki Sebang KM 11. Dari situ mobil memasuki jalan tak beraspal, jalan tanah keras berwarna kemerahan, menuju KM 52 lokasi seekor gajah ditemukan mati tanpa gading dikubur pada 23 Juni 2015 sesudah diautopsi oleh BBKSDA Riau.

Dua jam perjalanan badan terombang ambing. Sesekali mobil menghantam lobang. Suhu di luar mobil 33 derajat Celcius.

Kiri kanan jalan tampak pemandangan: pohon sawit, pohon akasia, rumah permanen, rumah terbuat dari kayu, lahan akasia bekas terbakar, pagar dari kawat besi yang melilit kayu-kayu tegak di dalamnya ada tanaman sawit berumur 1-2 tahun, juga perusahaan sedang panen akasia, ada 25 tenda yang dibangun oleh masyarakat adat Batin Beringin Sakai yang dibangun sejak April 2014 atas klaim seluas 7.128 ha lahan mereka masuk dalam konsesi perusahaan. Semua pemandangan itu berada dalam konsesi PT Arara Abadi Distrik Duri. Selain di dalam konsesi PT

Arara Abadi, gajah kerap ditemukan mati di dalam SM Balai Raja.

SEKELOMPOK pemuda dari Duri Kabupaten Bengkalis hobi mendaki gunung. Salah satu gunung yang sering mereka daki adalah Merapi, Sumatera Barat. Saking seringnya mendaki dan berkumpul di atas gunung, mereka buat satu komunitas yang giat melestarikan lingkungan.

Komunitas ini semacam Mahasiswa Pecinta Alam yang ada di kampus. Bedanya, mereka berasal dari beragam profesi. Mulai mahasiswa, guru hingga polisi. Mereka menamakannya Himpunan Pegiat Alam atau Hipam. Terbentuk pada 2006, pasca turun dari Gunung Merapi Sumatera Barat.

Pada 2009, pengurus Hipam mulai memperhatikan keadaan gajah di Kabupaten Bengkalis. Terutama di hutan Suaka Marga Satwa Balai Raja yang jadi jalur perlintasan hewan mamalia menyusui. Ini bermula, saat mereka menerima laporan dari warga tentang adanya gajah betina yang sakit.

HIPAM: Pegiat Alam

Oleh Sa...



Pengurus Hipam segera mendatangi lokasi yang disebut oleh warga. Namun, setelah melihat kondisi gajah, mereka bingung hendak berbuat apa terhadap hewan bergading tersebut. Seorang pengurus Hipam kemudian menghubungi pegawai Balai Besar Konservasi dan Sumberdaya Alam (BBKSDA) Provinsi Riau.

Satu hari kemudian, tim dari BKSDA pun turun. Mereka memeriksa kondisi gajah. Hasilnya, gajah diketahui terkena kanker payudara. "Satu hari setelah pemeriksaan itu, gajahnya meninggal," kata Arif, Ketua Hipam.

Pengalaman pertama menangani gajah ini buat pengurus Hipam bertekad untuk giat menyelamatkan gajah-gajah selanjutnya. Ditambah lagi, mereka sering menerima aduan banyaknya gajah mati karena diracun, ditembak bahkan terkena perangkap yang sengaja dibuat oleh manusia. "Kadang manusia pun berkonflik dengan gajah," ucap Asrul yang bergabung dengan Hipam sejak 2013.

Untuk memantau gajah yang lalu lalang di hutan

Balai Raja, pengurus Hipam bergantian patroli tiga kali dalam satu minggu. Jika menemukan gajah yang masuk dalam pemukiman atau merusak tanaman warga, mereka bersama-sama ikut menghalau gajah. Hal yang umum dilakukan, mereka membunyikan meriam karbit atau bunyi lainnya supaya gajah tidak masuk dan menyerang warga.

Selama pemantauan, pengurus Hipam kerap menemukan gajah yang sakit bahkan mati. Ada juga gajah yang putus kaki karena jerat yang dipasang warga. Kalau menemukan kejadian seperti ini, mereka segera menghubungi BKSDA dan terus memantau perjalanan gajah sembari menunggu tim medis datang. Sayangnya, bantuan ini kadang datang terlambat. "Kadang berminggu-minggu kami menunggu," kata Asrul. "Masalahnya, dokter gajah itu cuma ada satu di Sumatera ini. Di Medan," sambung Arif.

Meski rutin patroli, pengurus Hipam kadang tidak menemukan gajah yang melintas. Tapi, waktu senggang ini mereka gunakan berdialog dengan warga sekitar atau pekerja di kebun. Sambil

lam Pelindung Gajah

ryadi dan Made Ali



menikmati kopi, mereka mensosialisasikan cara menghalau gajah tanpa menyakitinya. Kompiler dan kopi adalah bekal yang tak pernah pisah dari pengurus Hipam saat patroli.

Pengurus Hipam punya pengalaman unik selama aktif melakukan patroli. Mereka kerap memberi nama pada gajah yang dijumpai. Gajah yang sudah diberi nama diantaranya Diana, Getar dan Jesika. Dua nama terakhir punya alasan tersendiri. Seekor gajah diberi nama Getar karena sempat buat Asrul gemetar di atas pohon.

Saat itu, Asrul sedang mengambil video gajah yang sedang lewat dari atas pohon. Tanpa sadar, ternyata di bawah pohon ada seekor gajah. Gajah tersebut seolah menunggu Asrul turun dan tak bergerak sedikit pun. Lama menunggu di atas, Asrul merasa takut dan gemeteran. Tak hanya itu, Asrul juga baru tahu, pohon yang ia panjat ternyata sudah mati dan tak ada lagi daun yang tumbuh sama sekali.

“Saya takut gajah itu menyeruduk pohon,” kening Asrul. Tapi ia beruntung, gajah kemudian pergi.

Sementara, gajah yang diberi nama Jesika karena pengurus Hipam teringat dengan peristiwa matinya Mirna yang diracun oleh Jesika.

Hal berkesan juga pernah dialami Arif. Saat mengintai gerombolan gajah yang lewat, ia tak sengaja menginjak perangkap yang dipasang oleh warga. Perangkap itu hampir saja mengenai wajahnya. “Kalau kena, merah juga muka dibuatnya tu,” ucap Arif.

Arif juga pernah hampir diikat oleh warga. Pasalnya, ketika mendampingi petugas dari BKSDA, ia ditinggal sendirian di kebun milik warga. Saat itu lagi musimnya gajah merusak kebun terutama sawit. Warga yang berbondong-bondong sedang mencari gajah melihat Arif sendirian dan disangka pemilik gajah. “Ikat. Ikat dia. Dia pemilik gajahnya tu,” ujar Arif tersenyum menengang cerita itu.

Semangat Arif dan teman-temannya tak pernah berkurang hingga sekarang. Mereka terus melakukan hal kreatif demi menyelamatkan gajah yang sudah tergolong punah di Sumatera. Pengurus Hipam pernah menggalang dana untuk membantu warga yang rumahnya roboh karena diserobot oleh gajah. Bantuan ini kadang mereka berikan secara penuh sampai rumah tersebut bisa

dibangun kembali. Bagi mereka yang tergolong mampu pun tetap dibantu oleh pengurus Hipam. “Tapi setengahnya saja,” kata Asrul.

Cara kelompok ini menggalang dana bermacam-macam. Mulai dari ngamen di jalan, di persimpangan lampu merah hingga mendatangi sekolah-sekolah. Tak jarang, mereka juga meminta pada pemerintah setempat seperti Camat. Kalau tak dikasih, mereka datang langsung satu persatu pegawai di kecamatan.

“Kami minta duitnya ke Camat dulu. Baru Camat nya kami ajak keliling menemui pegawainya. Kalau Camat nya ikut, pegawai pada takut semua,” tutur Arif.

Kini, selain memantau kondisi gajah, Arif dan kawan-kawan juga berusaha menyediakan lahan untuk ditanami makanan gajah. Tujuannya, ketika gajah masuk di pemukiman atau di kebun warga, gajah bisa dihalau ke lahan ini.

Ide ini dibuat berdasarkan pengalaman pengurus Hipam ketika berhadapan dengan gerombolan gajah. Mereka sering kebingungan. Tak tau gajah-gajah itu mau diarahkan ke mana. Hutan di Duri semakin berkurang. Padahal, jalur perlintasan gajah itu dulunya hutan yang jadi wilayah jelajah mereka.

Ini juga yang buat pengurus Hipam bertambah bingung karena protes dari warga. “Usir gajah kalian itu. Angkat gajah kalian itu. Kurung gajah kalian itu,” tutur Arif mengingat ucapan warga ketika mereka sedang patroli.

Hal lain yang jadi kendala pengurus Hipam menyelamatkan gajah, kurangnya perhatian pemerintah terhadap gajah yang masih tersisa. Pembukaan hutan dan pembuatan kanal sangat mengganggu kehidupan dan merusak habitat gajah. Gajah tak bisa melintas karena terhalang oleh kanal dalam lahan perusahaan. Kata Asrul, biasanya dalam bulan ini gajah sudah mulai masuk ke hutan Balai Raja.

Sekarang pemerintah Kabupaten Bengkalis membangun jalan untuk lintasan baru melewati Duri. Lintasan ini dikenal dengan jalan Lingkar. Namun, pembangunan jalan ini membuka hutan Balai Raja yang tersisa. Pengurus Hipam mengemukakan kebijakan yang sudah terlanjur terlaksana ini. Karena mengganggu jalur perlintasan gajah.

“Kita minta pemerintah menghentikan pengerjaan jalan itu.”#

SORE itu, seorang pria duduk di ujung jalan. Memakai kopiah, kaos putih dan sarung. Kulitnya cokelat dan jenggotnya putih. Dia mendekati seraya mengucapkan salam dan menjabat tangan.

Dia kemudian mengajak masuk menyusuri pelataran kayu dalam hutan bakau, lalu berhenti di tengah-tengah hutan. Di sini telah tersedia meja dan kursi juga di atas pelataran. Dia mempersilakan duduk. Di sekitar kami ada kantin dan pendopo. “Di sini tempat anak-anak sekolah alam bandar bakau. Sebelum mulai sekolah mereka sarapannya di sini,” katanya.

Ia adalah Darwis. Pendiri Pecinta Alam Bahari Bandar Bakau Dumai. Hutan bakau tempat kami bincang-bincang ini dikelola Darwis sejak 1998. Selain untuk menahan abrasi, hutan bakau juga di kenal sebagai simbol budaya masyarakat Dumai.

Di masa orde baru, Darwis pernah mengitari Sungai Dumai menggunakan sampan. Kadang berenang. Ia mengajak pemuda sekitar tempat tinggalnya. Mereka kadang memancing di tengah sungai. Hal ini dilakukan untuk mengetahui dua hal. Pertama melihat pohon bakau yang masih tersisa, kedua mencari tahu ketersediaan ikan dalam sungai. “Sering kami dapat sampah.”

Kondisi alam seperti ini sering dipentaskan oleh Darwis dalam satu panggung seni. Paling sering saat hari jadi Kota Dumai. Depan pejabat daerah

yang hadir ia tak segan-segan mengkritik lewat tampilan teater yang diciptakan sendiri. Paling berkesan bagi Darwis, saat main teater tentang sampah di Sungai Dumai.

Ia dan pemain lainnya menutup tubuh dengan sampah yang mereka dapat dari dalam sungai. Bahkan alat musik yang mereka mainkan di atas panggung barang-barang bekas yang hanyut di sungai. “Alat musik macam band tu kami tutup dengan plastik. Tak kami pakai.”

Teater tentang berkurangnya hutan bakau sepanjang pesisir Dumai juga pernah diceritakan Darwis dalam teater berjudul Raja Udang Tak Lagi Jadi Raja. Hilangnya pohon bakau juga mengakibatkan punahnya udang dalam sungai. Teater ini kata Darwis buat muka pejabat merah karena dikritik saat hadir dalam pertunjukan.

Usaha Darwis menjaga simbol budaya yang disebutnya sebagai marwah ini cukup panjang. Jika tidak karena ketekunannya, bakau di Kota Dumai sudah lama habis ditebang untuk memperluas pembangunan pelabuhan oleh Pelindo.

Darwis menolak pembangunan pelabuhan yang katanya untuk rakyat. Pembangunan pelabuhan ini akan menebang pohon bakau yang ada di sepanjang garis pantai Dumai. Darwis memasang plang penolakan di pohon bakau. Meski akhirnya menyaksikan sendiri pohon-pohon tersebut ditebang. Dia memvideo langsung proses penebangan itu dan menyerahkannya pada pe-



Darwis dalam Hutan Bakau Dumai

Oleh: Suryadi

merintah pusat. Katanya, pihak Pelindo ditegur setelah itu.

Tak habis akal, Darwis bergeser ke sisa pohon bakau yang ada di Dumai Barat. Katanya, Pelindo juga berencana membangun pelabuhan lagi di kawasan ini. “Yang saya tolak pertama itu di Dumai Timur.”

Darwis mengajak warga setempat untuk menanam bibit bakau bersama. Modalnya ia pinjam dari teman yang bekerja sebagai kontraktor. Modal Rp 10 juta yang diperoleh itu dibagi-bagi ke warga setempat untuk mencari bibit bakau di luar Kota Dumai. Seperti di Kepulauan Meranti. Hasilnya, hutan bakau yang awalnya hanya 2 hektar kini menjadi luas 20 hektar.

Darwis tak peduli jika hutan bakau itu nantinya ditebang. Baginya, yang penting berbuat dulu sambil meyakinkan pemerintah daerah hingga pusat agar hutan bakau di Dumai tidak disia-siakan. Usaha ini juga dilakukan Darwis pada seniman dan budayawan Dumai agar ikut prihatin dengan kondisi tersebut. Ia getol mempertanyakan kepedulian seniman dan budayawan serta pemerintah dalam forum-forum debat formal maupun non formal.

Kini, hutan bandar bakau hasil kerja keras Darwis ditetapkan sebagai wisata bahari Kota Dumai. Namun, Darwis tak sepenuhnya merasa lega. Ia berharap bandar bakau ini dijelaskan statusnya dalam RTRW Provinsi Riau. “Entah itu sebagai zona hijau, ruang terbuka hijau atau kawasan konservasi.”

UPAYA Darwis menjaga kelestarian hutan bakau terus berlanjut hingga sekarang. Ia menciptakan kader-kader dari usia kecil untuk ikut berperan dalam kegiatannya. Darwis membangun sekolah alam yang jadwal belajarnya pada hari Minggu. Dia memasukkan kurikulum tentang bakau. Muridnya yang dari sekolah dasar hingga menengah atas juga diajar berenang.

Darwis tidak sendiri jadi pengajar. Kadang ia meminta bantuan pegawai dinas lingkungan hidup dan dinas perikanan. Juga mahasiswa yang paham tentang mangrove. Mahasiswa yang sedang KKN sering jadi sasaran Darwis. Bahkan, akademisi atau dosen yang datang di bandar bakau juga diminta untuk mengajar. Salah satunya Aras Mulyadi Rektor Universitas Riau. “Semua

yang mengajar itu tidak dibayar. Termasuk anak sekolah yang datang juga digratiskan.”

Selain belajar, Darwis juga mengajak anak didiknya mengembangkan bibit bakau. Dengan begini, cukup membantu memenuhi kebutuhan belajar mengajar di sekolah alam dan tidak perlu lagi mencari bibit di luar. Bahkan bibit bakau ini dijual ke berbagai instansi dan ke luar daerah. Hasil penjualannya juga diberikan pada anak-anak sekolah yang membantu.

Darwis kini terus memutar otak, bagaimana a kawasan bandar bakau bisa dimanfaatkan masyarakat setempat sebagai lapangan pekerjaan. “Kita ingin menciptakan kerajinan dan industri kreatif dari alam ini.”

Tantangan Darwis tidaklah mudah. Dia harus menerima cemoohan warga. Disebut gila. Bahkan dia dianggap menghalangi warga untuk menebang bakau. Di awal sekolah alam berdiri pun tidak serta merta orangtua murid mengizinkan anaknya untuk masuk dalam kawasan bandar bakau.

Murid pertama sekolah alam cuma 3 orang. Itu pun anak Darwis sendiri. Ditambah 4 orang teman anaknya. Cara Darwis menarik simpati anak-anak dengan metode belajar yang unik. Caramah soal teori hanya setengah jam. Selebihnya ia membiarkan anak-anak bermain dengan cara mengenali jenis pohon bakau yang ada. Bagi yang dapat menjawab, diberi hadiah minuman cocacola.

Anak-anak tentunya senang. Tiap kali pulang, hadiah yang didapat diberitahu pada orangtua dan teman sebaya lainnya. Lambat laun, sekolah alam mulai ramai muridnya. Bahkan, kata Darwis, orangtua nya langsung datang mengantarkan anaknya. “Anak-anak pegawai malahan.” Sekarang, anak-anak sekolah alam dilibatkan Darwis dalam bermain teater dan seni lainnya. Di bawah teater Bendera, murid Darwis kerap tampil di tiap panggung seni dan seremoni terbuka pemerintah. Termasuk dalam rangka hari lahir Kota Dumai. Bantuan pun terus mengalir terutama dari pihak swasta.

Darwis kini sedang berupaya menghubungkan semua pelataran yang ada dalam kawasan bandar bakau. “Biar semua orang bisa berkeliling dalam hutan ini.”

TARMIZI menggugat Presiden, Menteri Kehutanan dan Gubernur Riau di PN Jakarta Pusat pada 9 September 2013. Tarmizi bersama penggugat Azraid (Rokan Hilir), Nasir, Zaini Yusuf, M Yusuf, Luk Priyanto, Amran dan Basir (Pelalawan) menggugat karena pemerintah telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa menerbitkan IUPH-HKHT di atas hutan alam dan gambut untuk korporasi.

Dengan mekanisme *Citizen Lawsuit* (gugatan warga) mereka menilai pemerintah telah lalai melaksanakan tanggung jawab sehingga muncul pemanasan global dan perubahan iklim di Riau. Pemanasan global di Riau dipicu kebakaran hutan dan lahan, perusakan hutan dan drainase gambut oleh korporasi.

Sejak hadirnya korporasi berdampak pada mata pencaharian mereka. Mereka mengalami kerugian materil dan imateril. "Hutan tak ade lagi. Hewan-hewan liar masuk ke pemukiman, salah satunya harimau. Kami merasakan ketika melakukan aktifitas keseharian," kata Tarmizi.

Tarmizi lahir dan hidup di Desa Jumrah, Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir, 60 tahun lalu. Desa Jumrah berada di lansekap Senepis dengan keragaman flora dan faunanya. Salah satunya habitat harimau.

Ia tinggal di rumah terbuat dari kayu sekitar lansekap Senepis. Tarmizi bangun rumah sejak tahun 2000. Materialnya dari kayu Punak dan Mmeranti yang ia cari di hutan.

Untuk masuk ke rumahnya kita harus melewati pelataran kayu semacam jembatan kecil untuk menyeberangi parit. Bisa juga dari samping dan harus menaiki dua anak tangga yang kondisinya kurang baik. Alias terlihat lapuk. Lantai rumahnya berdenyit kalau diinjak selama berjalan. Ada tiga kamar di dalam rumah. Satu di ruang depan, ruang tengah dan dekat dapur. Dulu Tarmizi punya dapur khusus tapi sudah roboh karena tak ada kayu untuk memperbaikinya. Ia dulu masak dengan kayu bakar.

Sejak dapat bantuan gas LPG ia buat dapur kecil yang menyatu dekat kamar belakang. Tak ada perabot mewah dalam rumah. Hanya ada kursi plastik yang dipakai untuk menyambut tamu. Tarmizi juga tumpukkan papan di atas loteng. Katanya, itu untuk merehab rumahnya nanti.



**Kehadiran
Perusahaan,
Derita Bagi
Tarmizi
Oleh: Suryadi**

Tapi kayunya belum cukup. Ia bertahan hidup dengan bertani, mencari kayu dan sesekali mencari ikan di Sungai Rokan Hilir.

“**SAYA** ini sejak tahun 80-an sudah keluar masuk dalam hutan Jumrah bahkan sampai Dumai sana. Saya tahu isi dalam hutan itu. Bersama warga di sini menebang kayu buat rumah. Sekarang kayu sudah tidak ada sejak perusahaan PT Ruas Utama Jaya masuk. Mereka menebang hutan dan menanam akasia,” kata Tarmizi. PT Ruas Utama Jaya beroperasi sejak 2007 berdasarkan SK Menteri N.330 No.SK.18/MENHUT-II/ 2007 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Alam (IUPHHK) seluas 44.330 Ha.

Kehadiran perusahaan, derita bagi warga Jumrah.

Mata pencaharian warga sudah tidak ada lagi dari hutan. Bahkan lahan warga juga diklaim sama perusahaan. Warga jadi takut mau menanam. Sewaktu-waktu pasti diusir oleh perusahaan.

“Kami sering diajak rapat oleh pemerintah desa bersama perwakilan perusahaan. Kami hanya minta perusahaan menunjukkan tapal batas konsesi mereka. Tapi mereka cuma bilang iya saja. Nanti akan ditunjukkan. Sampai sekarang sudah bertahun-tahun kami tak tau di mana batas lahan kami dengan perusahaan.”

Wilayah tanam perusahaan semakin luas dan semakin dekat dengan lahan masyarakat. Bahkan pemukiman dan kantor Desa Jumrah itu diklaim perusahaan miliknya. “Kami sudah coba protes dan demo berkali-kali ke perusahaan. Sialnya, pimpinan demo kami mudah disogok dan diberi pekerjaan oleh perusahaan. Warga yang lain jadi malas mau protes lagi. Demo ke Bupati pun kami tak pernah ada hasil. Sama saja, hanya dijanjikan,” kata Tarmizi.

Sejak perusahaan masuk, tak ada perubahan yang berarti bagi warga di sini. Mereka semakin miskin. Banyak yang menganggur. Sebagian tak punya lahan. Bekerja di perusahaan tapi digaji tak seberapa. “Itu pun sering terlambat menerima gaji.”

Tarmizi termasuk yang pernah bekerja di perusahaan itu. Sepuluh bulan bekerja, hanya tiga bulan yang dibayar. “Saya sampai menggadaikan motor dan surat tanah.”

“Saya sempat mau mengamuk ke dalam perusahaan dan mengancam akan membakar pompong mereka yang ada dalam sungai. Tapi mereka cepat sadar dan melunasi sisa gaji saya yang belum dibayar.”

Sekarang bisa dilihat pekerja yang ada di dalam perusahaan. Hanya beberapa orang yang berasal dari desa ini. “Itu pun pekerja kasar seperti tukang tanam bibit akasia. Tak ada yang sebagai karyawan.”

Kebanyakan pekerja datang dari Sumatera Utara. Mereka dirumahkan di sana. Tapi bisa kita lihat, pekerja itu hidup tak layak. Tinggal dalam bak container seperti peti kemas. Tak ada fasilitas umum di tempat tinggal mereka. Seperti sekolah, klinik atau puskesmas. “Sewaktu saya bekerja di dalam, beberapa kali mengantar perempuan mau melahirkan. Saat mau dibawa ke Dumai, akhirnya melahirkan dalam pompong. Suaminya langsung yang jadi bidan.”

Banyak anak-anak tinggal di sana. Tapi saya tak pernah melihat mereka diangkut pakai bus untuk diantar ke sekolah. Berbeda dengan perusahaan lain. Tiap pagi ada nampak bus menjemput dan mengantar anak-anak sekolah. “Saya pernah melihat, anak-anak yang tinggal di perusahaan Ruas Utama Jaya disembunyikan ketika tim audit datang meninjau ke lokasi.”

Tarmizi termasuk yang pernah ditegur oleh tim audit karena sudah umur 60 tahun masih bekerja di perusahaan. Ia bekerja mengangkut bibit akasia menggunakan pompong. Tapi setelah dikasih tahu tak boleh lagi bekerja, “saya minta anak yang menggantikan.”

Beberapa minggu setelah itu, orang perusahaan malah menelpon Tarmizi kembali agar bekerja seperti biasa. Begitulah perusahaan memperlakukan pekerja. Padahal gajinya sering terlambat berbulan-bulan baru dibayar.

Waktu musim asap, perusahaan membentuk masyarakat peduli api. Orang-orangnya dari warga sini. Tapi mereka digaji tak sepenuhnya. Tiga bulan bekerja hanya dibayar satu bulan. Itupun tidak sepenuhnya seperti yang dijanjikan diawal. “Akirnya warga sini pada berhenti dari MPA itu.”

Mereka sering diberi bantuan seperti kambing, lembu dan bebek. Tapi tak tahu hewan itu di mana sekarang. Pemerintah yang menerima bantuan itu tak bertanggungjawab dan tak pernah

jujur sama warga. “Katanya menolak bantuan dari perusahaan, kami lihat terima juga. Baru-baru ini, warga diberi bantuan bibit nanas dan lahan dua hektar. Kami dibentuk kelompok. Tapi hasilnya entah di mana. Kelompoknya pun tak jelas.”

Sekarang ini, semenjak perusahaan menembang hutan dan menanam akasia, sering terjadi kebakaran. Padahal dulu tak pernah terbakar sedikit pun. Tak hanya warga di sini yang jadi korban, hewan dalam hutan itu pun pada kabur dan masuk ke pemukiman warga. Ada warga yang digigit harimau saat menyadap karet. Ada lagi yang digigit saat buang air di belakang rumah. “Itu ada perempuan yang digigit telinganya kemarin pas buang besar.”

Saya sering melapor ke Pekanbaru, kalau ada kejadian apa pun di perusahaan. Seperti kebakaran, pembukaan lahan baru sampai harimau lalu lalang pun saya laporkan. “Saya lapor ke greenpeace, Walhi dan Jikalahari. Metro TV pun pernah saya temani masuk dalam hutan ini. Karena hanya saya yang tahu seluk beluk dan akses untuk masuk perusahaan.”

Gara-gara sering melapor itu, ia jadi paham menggunakan GPS. “Saya diajarkan orang-orang Greenpeace mengukur lahan perusahaan. Kadang pura-pura memancing pakai pompong menyusuri kanal perusahaan. Padahal di bawah jaring kami ada alat-alat khusus yang dibawa.”

“Saya kenal dengan aktivis lingkungan itu sejak lahan perusahaan mulai terbakar. Mereka datang ke sini cari pompong untuk masuk ke dalam perusahaan. Kebetulan saya punya. Nah, sejak itu saya selalu diajak. Bahkan mereka tidur di rumah ini. Bule pun pernah tidur di sini.”

Di tengah perjuangannya melawan perusahaan di tengah senepis, Tarmizi yang 60 tahun itu, masih tinggal di rumahnya: berlantai kayu, berdenyit kalau diinjak selama berjalan.#



***Selamat
Hari Hutan
Sedunia
21 Maret 2017***

***Mari Bersama
Menjaga Paru-paru
Dunia***

Jikalahari
Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau

SEBORANG pria berdiri menghadap jalan aspal. T-Shirt hitam melekat di tubuh tam-bunnya. Terlihat gambar siluet hitam gajah dan background lingkaran oranye hiasi tengah kaus yang ia kenakan. *Flying Squad WWF*.

“Saya sudah dari lahir ada di sini,” awal kisah mengalir dari sosok pria yang bernama Muham-mad Hatta ini. Lahir pada 6 Juni 1963 di Desa Situgal, Kabupaten Kuantan Singingi. Saat itu ia ingat warga yang menemani desa kelahirannya tak lebih dari 20 rumah. Kulit kayu jadi dinding rumah, jajaran bambu dijadikan lantai serta berat-apkan daun. Begitulah gambaran kondisi rumah di Situgal.

Sejak kecil, Hatta paham betul keadaan desanya. Keluar masuk hutan untuk mencari makan, buah-buah hutan atau membantu mengurus padi di ladang. Hingga 1970-an, warga Situgal hidup dari hasil bertani dan berladang. Mereka akan mem-bentuk kelompok dan berladang secara berpindah-pindah. Kebanyakan komoditas yang dikem-bangkan padi, cabe, sayuran dan karet. “Tapi karet dulu jarang jadi,” kata Hatta.

Banyaknya babi dan gajah yang berkeliaran menjadi ancaman terbesar bagi warga Situgal. Tak jarang ladang masyarakat yang siap panen dirusak dua satwa itu. Menurut Hatta masyarakat memang mengeluh, namun berpindah lokasi dan membuka ladang baru harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jumlah penduduk Situgal mulai bertambah pada 1990-an. “Ada sekitar 30 rumahlah yang dibangun. Tapi masyarakat masih belum terlalu banyak,” kata putra dari pasangan Timu dan Ma’i ini.

Perubahan terjadi pada 1997. Masyarakat mulai berhenti bertani kelompok. Hatta menghela nafas dan tampak berapi-api ketika ditanya alasannya. “Macam mana mau bertani, lahan masyarakat sudah habis diambil perusahaan.” PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP)—anak perusahaan APRIL Grup yang bergerak di bidang HTI—mulai masuk ke Situgal dan menanam lahan dengan tana-man akasia. Kedatangan perusahaan mengubah keadaan Situgal dan Hatta tak bisa diam men-yaksikan hal tersebut.

HATTA BANYAK BERDISKUSI BERKAITAN soal lingkungan dengan organisasi yang fokus terhadap penyelamatan lingkungan, salah satunya World Wild Fund (WWF). Awal tahun 2000 ia mulai bergabung dengan organisasi tersebut dan banyak mendapatkan peningkatan pemikiran terkait penyelamatan lingkungan. Pada tahun yang sama, ia juga diberi kepercayaan oleh masyarakat Situgal untuk menjadi Kepala Desa Situgal. “Kita ini apalah, sekolah ijazah SD pun tak punya, tapi karena warga percaya ya saya terima,” cerita pria yang menjabat sebagai Kades Situgal hingga 2011 ini.

Kehadiran perusahaan menurut Hatta tidak mem-bawa perubahan baik bagi masyarakat Situgal kala itu. Masyarakat Situgal bersepakat untuk tidak mau lahan mereka diganti rugi oleh perusahaan. Namun perusahaan tetap saja menanam di areal lahan masyarakat. Akibatnya lahan hidup mas-yarakat yang sudah berkurang serta bentuk per-tanggungjawaban perusahaan kepada masyarakat sekitar yang minim memicu konflik pada 2002. “Kita bakar waktu itu *mess* pekerja yang ada di dekat Situgal. Habis semua terbakar barang-ba-



Laahir di Hutan dan Berjuang untuk Hutan

Oleh: Nurul Fitria

rang mereka,” cerita ayah dari 5 putra dan 1 putri ini.

Usai pembakaran itu, Hatta berulang kali mendapatkan ancaman. Ia pernah hendak ditangkap polisi bahkan diancam hendak dibunuh. Ketika ditanya apakah tidak merasa takut, ia menjawab sambil tersenyum, “Saya hanya takut pada Tuhan.”

Penyelesaian kasus ini baru terjadi pada 2004. Tuntutan Hatta, 200 hektar lahan masyarakat harus di enclave dari RKT PT RAPP, perusahaan harus memberikan bantuan kepada masyarakat dan membantu pembangunan Kantor Desa. Selain itu Hatta juga menerima kompensasi dari perusahaan karena merasa dirugikan keamanannya akibat ancaman dari pihak perusahaan. “Tuntutan kita dipenuhi saat itu, tapi sekarang perusahaan mulai berubah lagi *nampaknya*,” keluh Hatta.

Selama ia menjadi Kades Situgal, Hatta membuat kebijakan bagi masyarakatnya untuk tidak bekerja pada perusahaan, bahkan untuk menjadi kuli harian sekalipun. Menurutnya masyarakat dapat mengembangkan ladangnya memenuhi kebutuhan. “Jika menunggu lahan belum menghasilkan, biasanya mereka kerja jadi kuli harian untuk lahan milik orang lain.” Walaupun sudah tak menjabat sebagai Kades, menurut Hatta sampai saat ini masyarakat tetap komitmen tidak bekerja pada perusahaan.

Pada 19 Juli 2004, pemerintah meresmikan Taman Nasional Tesso Nilo dengan luasan 38.576 hektar terbentang di antara Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu. Pada 19 Oktober 2009 diperluas ke Kabupaten Kuantan Singingi dan Kampar dengan luasan menjadi 83.068 hektar. Hatta menjelaskan ia jadi salah satu masyarakat yang mendorong agar TNTN dapat terwujud. “Apa lagi usaha yang bisa dibuat untuk menyelamatkan hutan tempat kita hidup ini,” kata Hatta.

Bagi Hatta jika hutan tak dijaga, masyarakat tak akan tahu bisa hidup bagaimana lagi. Ia merasakan secara langsung perubahan yang terjadi di tanah kelahirannya. Ia bandingkan saat kecil dengan kini, cuaca menjadi sangat panas dan sering terjadi kekeringan air. Ia bercerita, dahulu cuaca Situgal sejuk, ditambah kayanya hasil hutan berupa buah-buahan. “Kalau dulu sudah musim cempe-dak hutan, wangi semua sepanjang jalan. Sekarang apa buah hutan yang ada? Akasia dan sawit,” kata pria yang pernah bergabung di Forum Taman Nasional Tesso Nilo pada 2004 – 2010 sebagai tim pengawas ini sambil tertawa miris.

Hatta menambahkan dahulu untuk mencari sumber airpun tidak sulit. Menggali tanah setengah meter saja bisa menemukan mata air. “Kalau sekarang, coba saja hujan besar hari ini, dua hari kemudian panas kering, kering pula lah sumber air *tu*,” keluhnya. Tak hanya cuaca panas dan kekeringan air, ancaman angin puting beliung serta perambahan juga mengancam Situgal.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Hatta bersama masyarakat melakukan patroli masyarakat. Ini juga merupakan bagian kegiatannya setelah bergabung dengan bersama masyarakat melakukan patroli masyarakat. Ini juga merupakan bagian kegiatannya setelah bergabung dengan Yayasan Taman Nasional Tesso Nilo sejak 2011 hingga kini. Hatta rutin melakukan patroli untuk mengecek perambahan, gajah serta kebakaran hutan dan lahan.

“Kita pernah temukan gajah dua ekor akhir 2016 kemarin di dalam TNTN tapi sudah mati di racun,” ceritanya. Kedua gajah yang ia temukan sudah tak bergading lagi. Menurutnya kehidupan gajah di TNTN terancam karena tidak adanya ruang hidup bagi gajah. Ia menyarankan kepada pemerintah untuk menyediakan kantong-kantong gajah. “Jadi kalau kita ketemu ada gajah di luar, bisa kita giring ke kantong-kantongnya biar aman dan dijaga.”

Saat ini Hatta cukup mengalami kesulitan untuk melakukan patroli karena kurangnya personil. Pada awal 2011 ia memiliki 30 anggota, saat ini hanya tinggal 4 orang. Menurutnya menumbuhkan kesadaran masyarakat ini yang cukup sulit. “Saya pernah pikir mungkin dengan kondisi hutan seperti sekarang, kita akan punya pemikiran yang sama untuk selamatkan lingkungan. Sayangnya itu cuma pemikiran saya, kenyataannya tak sama.”

Hatta menekankan, sekarang anak muda serta para pemangku kepentingan haruslah berpikir panjang. Jangan hanya memikirkan hidup senang untuk 1 atau 2 bulan kedepan. Namun harus memikirkan apa yang akan terjadi 10 atau 20 tahun lagi. Jika sekarang senang karena uang yang tak seberapa tapi hutan hilang, tak akan ada artinya. “Pemerintah juga kalau buat keputusan itu jangan pandai-pandai cuma duduk di meja. Lihat langsung. Mana desa yang masuk konsesi perusahaan ini.”

Bagi Hatta hutan adalah segalanya. Lahir di hutan, besar di hutan dan berharap sampai mati pun tetap berada di hutan yang membesarkannya.#



75

PERUSAHAAN HTI DI RIAU



2,3 Juta Ha

LUAS LAHAN HTI DI RIAU



1,46 Juta Ha

LAHAN HTI DI RIAU BERADA DALAM KAWASAN GAMBUT



26

PERUSAHAAN TERAFILIASI DENGAN APP DENGAN TOTAL LUAS KONSESI



42

PERUSAHAAN TERAFILIASI DENGAN RAPP DENGAN TOTAL LUAS KONSESI

1,06 Juta Ha 1,04 Juta Ha

8

PERUSAHAAN HTI LAINNYA DENGAN TOTAL LUAS KONSESI

240 Ribu Ha

DALAM DRAFT RTRWP LUASAN HTI TIDAK BERKURANG, KONSUKENSINYA WARGA DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM AREAL HTI DAPAT DIPIDANA MENGGUNAKAN UU KEHUTANAN DAN UU TATA RUANG

RIAU SUDAH TIDAK MAMPU MENAMPUNG IZIN HTI YANG MENCAPAI 2.3 JUTA HEKTAR. LUASAN TERSEBUT AKIBATKAN KETIDAKSEIMBANGAN LINGKUNGAN DAN SDA UNTUK MASYARAKAT. AKIBATNYA, TERJADI BANJIR, LONGSOR DAN KARHUTLA. MASYARAKAT JUGA KEHILANGAN RUANG HIDUP. SEHARUSNYA JUMLAH DAN LUASAN HTI DI RIAU HARUS DITINJAU ULANG. JIKA PERLU CABUT SAJA IZIN HTI DAN BERI RUANG KELOLA PADA MASYARAKAT

376 PERUSAHAAN SAWIT DI RIAU SECARA ILLEGAL MONGGUNDULI HUTAN. MERAMPAS RUANG HIDUP DAN HAK KELOLA RAKYAT. AKIBATNYA RIAU MENGALAMI KEKERINGAN DAN KEBAKARAN DI MUSIM KEMARAU JUGA BANJIR DI MUSIM HUJAN.



3.4 Juta Ha

LAHAN DI RIAU UNTUK PERKEBUNAN SAWIT



513

PERUSAHAAN SAWIT (PERUSAHAAN+PKS) TERDATA DI RIAU

949.789 HA

luas lahan legal (Versi BPN 2015). 325.267,04 Ha HGU berada dalam kawasan gambut

2.494.284 HA

luas lahan illegal di Riau yang dikuasai perusahaan sawit tanpa izin pelepasan kawasan hutan

137
BERIZIN

376
TAK BERIZIN

Jikalahari
Liputan Kerja Penyelamat Hutan Riau

#TOLAKDRAFTRTRWPRIAU2016-2035

SUMBER FOTO: INVESTIGASI JIKALAHARI DI 183 HPH PT SAK RIAU TAMBER DATA: TIM RISET DAN GG JIKALAHARI MENGUMPULKAN DATA BERBASIS SUMBER DESAIN: YKI